

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Maret IV Tahun 2021 No. 9

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.

Impor Beras 1 Juta Ton

Resahkan Petani



Menguji Konsistensi Ucapan dan Perbuatan Dalam Bernegara

Maka saat ada wacana Presiden tiga periode, meski sudah dibantah oleh empunya. Kita masih merasa khawatir, karena wacana ini menyeruak membengkak kala kerusakan lingkungan yang semakin parah, pengangguran dan angka kemiskinan kian meningkat.

Rasanya ganjil meminta sesuatu yang rumit, ditengah prestasi yang tidak istimewa.

Bukan pertama kali pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang sarat kontroversi dan inkonsistensi. Tidak perlu bicara yang lalu-lalu, cukup apa yang ada di pandangan kita saat ini saja. Betapa mahal harga sebuah konsistensi di hamparan kerja-kerja kenegaraan. Rumitnya keruwetan ini terjadi di semua level dan posisi, sengkaret masalah yang berpotensi menjadi bom waktu yang sangat dahsyat.

Pemerintah awalnya gaungkan gerakan "benci impor", tak perlu lama dan berganti pekan keluar legalisasi importasi garam dan beras. Padahal saat ini sedang bersiap

memasuki masa panen dan persediaan melimpah ruah di gudang. Tidak hanya itu, dalam soal penanganan pageblug berbagai jenis pengetatan retak ditengah jalan karena kebijakan yang dibuat lemah dalam penegakan dan cenderung mendorong kerumunan.

Juga frasa Agama yang sempat dihilangkan dari Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPn) 2020-2035. Padahal pendidikan agama memberikan kontribusi luar biasa dalam sistem pendidikan selama ini. Ada pula terkait lampiran Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang

melegalkan minuman keras. Mabuk investasi, terseok-seok di lembaran negara karena basis argumentasinya lemah dan membahayakan. Jika hendak dirunut banyak yang menjadi catatan. Maka saat ada wacana Presiden tiga periode, meski sudah dibantah oleh empunya. Kita masih merasa khawatir, karena wacana ini menyeruak membengkak kala kerusakan lingkungan yang semakin parah, pengangguran dan angka kemiskinan kian meningkat. Rasanya ganjil meminta sesuatu yang rumit, ditengah prestasi yang tidak istimewa.

Demokrasi dan reformasi

yang kita perjuangkan sungguh sedang dalam ancaman. Sungguh jika benar wacana itu terjadi, kita akan sangat mundur kebelakang (set back) dalam menempuh jalan demokrasi ini. Wacana presiden melebihi masa sungguhalah terjadi disetiap era kepemimpinan. Namun wacana itu terhenti dengan sendirinya karena sifat kenegarawanan Presiden itu sendiri, yang memahami esensi demokrasi dan rotasi kepemimpinan bangsa. Tidak mudah terbuai puja dan puji demi melanggengkan ego pribadi.

Jangan mudah lelah mengawal kebijakan negara, bukan tidak percaya atau

menaruh curiga. Karena ujian kecermatan kita sepanjang lintasan satu dekade ini untuk kesekian kali dipertaruhkan. Waktu yang akan memberikan penjelasan. Wajar kita khawatir, karena bukan sekali-dua kali "public policy prank" model ini kerap kali dilakukan. Satu waktu bilang tidak, lain waktu ucapkan iya. Bilang iya, kemudian tidak. Jadi kebiasaan dan habitual tanpa beban.

Setelah reaksi publik memuncak, respon Pemerintah berubah dan menegaskan bahwa laku lampah itu salah. Entahlah jika publik tidak cermat dan riji mengawasi kerja Pemerintah.

Rugikan Petani
saat Panen Raya!



IMPOR BERAS HARUS DITOLAK



Johan Rosihan:
**Merugikan
Petani saat
Panen Raya!**

Akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian. Apabila terjadi gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan, dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di Indonesia



Andi Akmal:
**Bila soal Impor
Kebijakan selalu
Kontradiktif**

Kebijakan Beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Disisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi Impor kok jalan terus?,"



Slamet:
**Kemana proyek
Food Estate?**

Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?,"

Anggota Komisi IV FPKS : Isu Impor Beras **Meresahkan** Para Petani

KUTIPAN

Jakarta (08/03) — Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan topik pembahasan yang akan disampaikan pada rapat komisi di Masa Sidang IV DPR RI yang dimulai sejak (8/3)

Pria yang akrab disapa Akmal ini mengatakan bahwa komisi IV akan berfokus melakukan pengawasan khususnya terkait isu impor beras dan kebakaran hutan yang dinilai cukup meresahkan.

"Komisi IV akan berfokus melakukan pengawasan terkait bidang pertanian, kelautan, dan kehutanan. Khususnya terkait isu impor beras yang meresahkan bagi para petani, karena sementara ini laporan dari kementerian pertanian menunjukkan bahwa kita surplus, sehingga disini ada yang perlu kita dalam." ungkap Anggota Dewan asal Sulawesi Selatan ini.

Akmal juga menyampaikan bahwa pada masa sidang kali ini, Komisi IV akan melaksanakan fungsi pengawasan

anggaran.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa persidangan kemarin kita menyetujui untuk refocusing anggaran, saya kira kedepannya kita melihat bagaimana refocusing anggaran ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita bahas di Komisi IV," terangnya.

Sebagai penutup, Akmal menyampaikan bahwa aspirasi yang diserap pada saat reses akan dibahas pada rapat komisi dengan harapan akan terealisasi pada waktu mendatang.

"Untuk reses ini sudah menjadi kegiatan rutin, aspirasi yang diserap dari Daerah Pemilihan (Dapil) akan diformulasi melalui rapat-rapat komisi sehingga akan direalisasikan di waktu yang akan datang," tutup Akmal.



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Komisi IV akan berfokus melakukan pengawasan terkait bidang pertanian, kelautan, dan kehutanan. Khususnya terkait isu impor beras yang meresahkan bagi para petani, karena sementara ini laporan dari kementerian pertanian menunjukkan bahwa kita surplus, sehingga disini ada yang perlu kita dalam."

Rencana Impor 1 Juta Ton Beras Disoal, Politisi PKS Bertanyakan Food Estate

KUTIPAN

Sukabumi (07/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, mempertanyakan program Food Estate yang telah digembarkan pemerintah. Hal ini menyusul rencana impor 1 juta ton beras yang akan dilakukan pada tahun ini.

"Pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan atas program Food Estate," kata Slamet, Minggu, (07/03).

Legislator asal Sukabumi ini meminta pemerintah terbuka soal perkembangan Food Estate. Pasalnya, rencana impor 1 juta ton beras dinilai kontradiktif dengan wacana Menteri Pertahanan Prabowo yang menyebut Food Estate menggunakan sistem pertanian presisi sehingga bisa menghasilkan 3 hingga 4 kali lebih banyak (sekitar 17 ton per hektar) produk ketimbang dengan penggunaan teknologi biasa.

"Sampaikan kepada publik tingkat keberhasilan dari

program ini," tegas Slamet.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harga komoditas tersebut bisa tetap terkendali. Sehingga ia berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun 2021.

"Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka

seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?," tanya Slamet.

Slamet menjelaskan bahwa proyek Food Estate telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian, termasuk untuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani.

"Jangan sampai anggaran dan pupuk yang sudah terbatas dialihkan dari petani ke Food Estate, tetapi tidak menambah produksi panen nasional," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan impor yang dibuka lebar melalui UU Cipta Kerja, memberikan peluang besar bagi lapangan kerja petani luar negeri dan mempersempit peluang pemasaran produk petani dalam negeri.

"Kami mengingatkan agar pemerintah tidak mudah menerapkan impor demi memberi optimisme kepada petani Indonesia," pungkasnya.



drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?,"

Terkait Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Aleg PKS: Harus Ditolak, **Merugikan Petani** saat Panen Raya!

KUTIPAN

Sumbawa (05/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, dengan tegas menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan tahun 2021.

Menurut Johan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani apalagi dilakukan pada saat petani sedang panen raya.

"Jelas ini merugikan petani dan wajib kita tolak agar pemerintah menyadari tidak hanya memikirkan stok beras tapi juga yang paling penting adalah memperhatikan nasib petani dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani," ujar Johan.

Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menilai kebijakan rencana impor beras 1 juta ton untuk penyediaan stok dalam negeri akan berdampak semakin

terpuruknya sektor Pertanian dan selalu merugikan petani.

"Jadi pemerintah sebaiknya janganlah selalu membangun narasi akan meningkatkan produksi beras melalui berbagai program namun fakta kebijakan yang digulirkan malah ironi seperti memotong anggaran Pertanian dan selalu melakukan impor beras yang terbukti merugikan petani," tegas Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan petani selalu rugi akibat dampak impor beras karena harga penjualan tidak mampu untuk menutupi ongkos produksi dan seringkali beras dari petani kita tidak terserap di pasaran dan

Bulog juga terkadang tidak mampu menyerap hasil produksi beras dari petani.

"Kondisi ini menyebabkan petani kita selalu berada pada keadaan merugi terus-menerus", tutur Johan.

Pemerintah harusnya memperhatikan nasib petani dimana Petani berharap pada saat panen dan dengan harga yang disesuaikan ongkos produksi dapat meraih keuntungan, lebih-lebih ketika harga tinggi.

"Namun akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian. Apabila terjadi gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan, dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di Indonesia," urai Johan.

Politikus PKS ini berharap pemerintah segera membatalkan rencana impor beras ini demi kedaulatan pangan Nasional.

Saya ingatkan pemerintah bahwa kita tidak perlu impor beras saat ini karena ketersediaan kita cukup dari produksi dalam negeri dan semestinya pemerintah fokus



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya ingatkan pemerintah bahwa kita tidak perlu impor beras saat ini karena ketersediaan kita cukup dari produksi dalam negeri dan semestinya pemerintah fokus pada stabilitas harga dan pasokan pangan agar kemandirian pangan kita semakin baik"

pada stabilitas harga dan pasokan pangan agar kemandirian pangan kita semakin baik," tutur Johan.

Impor beras ini, imbuhnya, jangan hanya didasarkan pada keinginan pemerintah namun mengabaikan Multiplier effect yang terjadi yakni nasib petani semakin memprihatinkan.

"Membanjirnya beras impor di pasaran adalah

menyakitkan bagi petani dan keluarganya yang telah bekerja keras, berkinerja untuk memproduksi beras dalam negeri demi kemandirian pangan nasional. Situasi inilah yang mestinya jadi pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan kebijakan impor", papar Johan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

KPPRI Selenggarakan Talkshow, Netty: Perspektif Perempuan **Harus Hadir** untuk Politik Berkeadilan

KUTIPAN

Jakarta (08/03) — Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) menggelar pameran foto dan rangkaian talkshow bertajuk 'Kiprah Perempuan Parlemen: Jalan Harapan Bangsa' pada 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Isu talkshow meliputi pemerintahan daerah, vaksinasi, pendidikan daring, perkawinan anak, pengembangan energi hijau, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, dan wirasusaha perempuan.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengatakan langkah KPPRI bertujuan menunjukkan kiprah perempuan parlemen dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat yang perspektifnya harus diakomodir dalam pengambilan keputusan politik, katanya dalam keterangan media, Senin, (08/03)

"Perspektif perempuan mewakili setengah populasi. Oleh sebab itu, dalam setiap isu krusial dan strategis, sikap dan pandangan perempuan parlemen harus didengarkan dan diakomodir agar setiap pengambilan keputusan politik memenuhi standar berkeadilan dan komprehensif," kata politisi PKS yang juga menjadi salah satu penanggung jawab kegiatan.

Netty sendiri akan beracara soal 'Menjamin Ketersediaan Akses Vaksin COVID-19' yang akan digelar pada Rabu, 17 Maret 2021 mendatang.

"Kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah isu strategis

dalam penanganan pandemi yang harus mendengar pandangan perempuan. Bukan sekadar ampuh, berkualitas dan halal, kebijakan vaksin juga perlu memperhatikan proses edukasi dan komunikasi pada masyarakat. Perempuan umumnya memiliki peran sentral di keluarga yang penting dijadikan sebagai agen of socialisation, sebagai komunikator yang andal, yang akan didengarkan oleh keluarga," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Terkait akses yang berkeadilan terhadap vaksin, kata Netty, perempuan akan lebih mempertimbangkan keselamatan umat manusia daripada bicara sisi keuntungan dan bisnis.

"Perempuan tentu berpihak pada keselamatan umat manusia keseluruhan daripada hitung-hitungan bisnis," katanya.

Netty berharap dengan ruang politik yang lebih ramah dan kondusif terhadap perempuan, akan semakin banyak perempuan parlemen Indonesia berani bersikap dan



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Perspektif perempuan mewakili setengah populasi. Oleh sebab itu, dalam setiap isu krusial dan strategis, sikap dan pandangan perempuan parlemen harus didengarkan dan diakomodir agar setiap pengambilan keputusan politik memenuhi standar berkeadilan dan komprehensif"

bersuara membela keadilan dan kebenaran.

"Kita bukan bicara perempuan sentris, tapi melihat bahwa kebijakan adalah sesuatu yang berdampak secara sistematis kepada

rakyat, maka pandangan perempuan harus didengar dan diakomodir. Semoga pada 2024 minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwujud," katanya.

Hari Perempuan Internasional

Aleg PKS Ajak untuk Pastikan setiap Anak Dapatkan Haknya

● KUTIPAN

Jakarta (08/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mengajak seluruh perempuan Indonesia, terutama para ibu untuk memastikan semua Anak Usia Dini mendapatkan Haknya dimanapun berada.

"Perempuan adalah Ibu Bangsa, melahirkan, membesarkan dan mendidik putra putri Generasi penerus bangsa. Pastikan semua Anak Usia Dini mendapatkan Haknya dimanapun berada Mari kita berikan layanan PAUD yang berkualitas", kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengatakan, ada paling sedikit Sepuluh hak anak yang mesti di upayakan agar anak-anak kita menjadi anak yang berkualitas baik fisik maupun karakternya.

"Yang pertama adalah Hak Pendidikan. Dengan hak pendidikan ini, orang tua dan orang disekitarnya akan memberikan stimulasi positif setiap detik hidup anak tersebut," sebut Nevi.

Yang Kedua, lanjutnya,

adalah Hak Bermain. Dengan bermain yang terdidik dengan lingkungan yang baik, akan sekaligus memberikan pembelajaran bagaimana memaknai hidup dan bersosialisasi dengan sesama. Bermain bagi anak merupakan salah satu cara belajar dan sekaligus memberikan kebahagiaan kepada anak", tutur Nevi.

Selanjutnya Politisi PKS ini mengatakan, hak yang ketiga adalah anak memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Kemudian yang keempat adalah Hak Pengasuhan. Anak diasuh dengan kasih sayang. Kasih sayang ini akan memberikan nilai positif dalam berbagai hal seperti agama, cinta tanah air, toleransi, dan sebagainya.

"Yang kelima hak yang

perlu diberikan kepada anak lanjut Nevi adalah, Hak mendapatkan gizi seimbang. Gizi seimbang ini akan mampu memerangi stunting di negeri Indonesia," ungkapnya.

Dengan kualitas gizi yang diserap anak-anak sejak dini hingga remaja, tambahna, akan membentuk kualitas fisik dan kecerdasan yang sangat baik pada generasi mendatang.

"Ketika pemimpin bangsa ini di pegang oleh calon-calon generasi yang kuat fisiknya, ber-karakter dalam sikapnya, dan cerdas dalam berpikirnya, maka kedepannya, harapan Indonesia sebagai negara maju di dunia akan dapat terealisasi. Gizi seimbang untuk anak, mesti diawali memastikan hanya ASI usia 0-6 bulan lalu ASI diteruskan sampai 2 tahun dengan MPASI yang tepat", tutur Nevi.

Legislator perempuan asal Sumatera Barat ini melanjutkan, hak keenam untuk diberikan kepada anak adalah kesehatan Fisik Anak. Yang Ketujuh adalah hak Sehat Mental, Spiritual dan yang ke delapan adalah hak untuk bersosialisasi, berinteraksi,

**Hj. NEVI ZUAIRINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Perempuan adalah Ibu Bangsa, melahirkan, membesarkan dan mendidik putra putri Generasi penerus bangsa. Pastikan semua Anak Usia Dini mendapatkan Haknya dimanapun berada Mari kita berikan layanan PAUD yang berkualitas"

berkomunikasi. Jadi kesehatan yang diberikan kepada anak bukan saja hak fisik, tapi juga kesehatan ruhani.

Nevi melanjutkan, hak yang kesembilan yang mesti diberikan kepada anak adalah

hak Perlindungan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), sangat disayangkan masuk dalam Prolegnas tahun 2021.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sejalan dengan Muhammadiyah,

Fraksi PKS **Tegaskan** Agama Jadi Bagian Integral Visi Pendidikan Nasional

KUTIPAN

Jakarta (08/03) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi dan mendukung kritik yang dilontarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir terhadap Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pasalnya peta jalan itu disinyalir tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 31 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama tidak dicantumkan frasa 'agama' dalam visi pendidikan Indonesia 2035.

"Kritik Ketum Muhammadiyah Profesor Haedar Nasir sangat fundamental dan elementer. Bagaimana mungkin agama iman dan takwa tidak termasuk dalam visi peta jalan pendidikan Indonesia, padahal hal itu jelas ada dalam visi pendidikan nasional menurut UUD 1945 dan UU Sisdiknas," tanya Jazuli.

Sikap PP Muhammadiyah itu sejalan dengan sikap Fraksi PKS melalui anggotanya di

Komisi Pendidikan. Ketua Fraksi PKS DPR ini telah mengecek dan mendengar penjelasan Anggota PKS di Komisi X DPR bahwa Peta Jalan tersebut juga telah mendapat respon dan kritik tajam dari Anggotanya, mulai dari alas hukum, hingga paradigmanya yang tidak mengacu pada UU Sisdiknas dan UUD 1945.

"Atas seluruh kritik dan masukan akhirnya di Komisi X hanya diakui sebagai pra konsep dan bukan peta jalan pendidikan. Untuk sampai pada peta jalan harus dilakukan secara cermat, dibahas secara terbuka dan transparan, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan nasional, dan

terpenting wajib merujuk UUD 1945 dan UU Sisdiknas," terang Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengucapkan terima kasih kepada ormas Islam seperti Muhammadiyah yang secara tekun dan konsisten menjaga ruh pendidikan nasional yang membentuk karakter generasi bangsa yang utuh dan menyeluruh baik secara kognitif, afektif, dan konatif.

"Pendidikan kita menurut konstitusi mementingkan karakter keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai pondasi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga benar-benar memadukan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Jadi peran agama sangat penting, jangan sampai dihilangkan sehingga pendidikan menjadi sekularistik," tandas Jazuli.

Pasal 31 UUD 1945 jelas menegaskan : Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Atas seluruh kritik dan masukan akhirnya di Komisi X hanya diakui sebagai pra konsep dan bukan peta jalan pendidikan. Untuk sampai pada peta jalan harus dilakukan secara cermat, dibahas secara terbuka dan transparan, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan nasional, dan terpenting wajib merujuk UUD 1945 dan UU Sisdiknas”

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Lalu disambung Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Monday, March 8

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2021



8 ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN FRAKSI PKS DPR RI

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. ● Hj. Nevi Zuairina ● Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si.
Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag ● Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T ● Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Saadiyah Uluputty, S.T ● Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A

Terkait Penolakan Perpanjangan Otsus, **Aleg PKS: Lebih Baik Pusat Pemerintahan Pindah ke Papua**

KUTIPAN

Ketertinggalan pembangunan di Indonesia bagian timur khususnya Papua menjadi akar permasalahan munculnya gejolak sosial rakyat Papua yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Kita pindahkan istana Presiden, gedung DPR dan DPD RI, maupun instansi pemerintahan lainnya, bekerja dari Papua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia

Jakarta (05/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengatakan aspirasi menolak perpanjangan otonomi khusus yang dilakukan sebagian rakyat Papua sebagai sebuah hal yang wajar.

"Mungkin dalam aplikasi kebijakan otonomi khusus tidak dirasakan maksimal hasilnya oleh rakyat Papua. Menurut saya, Pemerintah Pusat harus melakukan kebijakan lebih serius untuk rakyat Papua, seperti pemindahan pusat pemerintahan," kata Surahman Hidayat.

Surahman mengingatkan

bahwa Indonesia bagian timur lebih membutuhkan prioritas perhatian Nasional.

"Ketertinggalan pembangunan di Indonesia bagian timur khususnya Papua menjadi akar permasalahan munculnya gejolak sosial rakyat Papua yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Kita pindahkan istana Presiden, gedung DPR dan DPD RI, maupun instansi pemerintahan lainnya, bekerja dari Papua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Surahman.

Anggota Komisi II DPR RI

ini menilai dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Papua akan membuat perhatian Pemerintah dan bangsa ini menjadi penuh terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Papua pada akhirnya diharapkan mengakhiri kekecewaan rakyat Papua yang berkepanjangan.

"Saya yakin yang diinginkan rakyat Papua bukanlah memisahkan diri dari NKRI, tapi mereka berharap bisa hidup dengan aman dan layak baik dari segi pendidikan maupun penghidupan," kata Surahman.

Surahman Hidayat mengatakan bahwa sudah cukup lama rakyat Papua bersabar dan menunggu perubahan kehidupan.

"Sampai saat ini rakyat Papua masih menunjukkan besarnya rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan Papua bukanlah permasalahan rakyat Papua semata, tapi permasalahan bangsa Indonesia," pungkas Surahman.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi II DPR RI

"Ketertinggalan pembangunan di Indonesia bagian timur khususnya Papua menjadi akar permasalahan munculnya gejolak sosial rakyat Papua yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Kita pindahkan istana Presiden, gedung DPR dan DPD RI, maupun instansi pemerintahan lainnya, bekerja dari Papua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,"

PKS Desak Kemendagri Tuntaskan soal Fotocopy e-KTP: Ini Mubazir!

KUTIPAN

Jakarta (08/03) --- e-KTP kembali disorot karena fungsinya yang dianggap sama saja dengan KTP biasa yang masih dimintai fotokopi jika mengurus sesuatu.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta Kemendagri untuk memasang target agar urusan fotokopi e-KTP bisa selesai.

"Ini mubazir jika masih perlu fotokopi KTP. Mestinya semua sudah berbasis data elektronik. Antar kementerian dan instansi termasuk perbankan cukup men-swipe e-KTP dan semua data mestinya sudah bisa digunakan," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (5/3).

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta agar Kemendagri segera menuntaskan persoalan tersebut dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Dengan begitu, kata dia, beban rakyat bisa diringankan dengan penggunaan e-KTP secara elektronik.

"Saya dorong Kemendagri, Dirjen Dukcapil untuk menetapkan target kapan urusan fotokopi e-KTP bisa tuntas. Jika bisa dalam hitungan satu dua bulan

ini. Kemendagri mesti menugaskan Dirjen Dukcapil melakukan aksi meringankan beban rakyat dengan moto 'Tidak Perlu Focopy KTP', karena kita sudah punya KTP-el," ucapnya.

Mardani lantas mengomentari terkait unit layanan di Kemendagri yang sudah menerapkan layanan secara elektronik dengan e-KTP. Menurut dia, hal tersebut tidak berguna lantaran yang membutuhkan teknologi itu orang daerah.

"Itu tidak berguna artinya yang perlu tanpa fotokopi justru orang daerah yang jauh dari fasilitas. Wajib segera (seluruhnya elektronik)," ujarnya.

Sebelumnya, ramai perbincangan di media sosial yang membahas fungsi e-KTP. e-KTP dianggap sama saja dengan KTP biasa karena masih dimintai fotokopi jika mengurus

sesuatu. Kemendagri memberikan penjelasannya soal fotokopi e-KTP tersebut.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menjelaskan e-KTP sudah dilengkapi chip. Chip tersebut sudah berisi data kependudukan.

"KTP elektronik di dalamnya berisi chip, yang chip itu berisi data kependudukan. Seperti yang terbaca di KTP-el saat ini datanya. Ditambah ada sidik jari," kata Zudan Arif saat dihubungi detikcom, Kamis (4/3).

"Fungsi KTP el yang utama adalah untuk penunnggalan data, sehingga penduduk tidak terdada lebih dari satu kali," imbuhnya.

Dia mengatakan data ini bisa digunakan oleh lembaga-lembaga untuk penunnggalan data. Sudah ada 2.851 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil.

"Nah, dengan ada yang lebih akurat ini, data KTP el sekarang ini sudah bisa dipergunakan oleh 2.851 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil," katanya.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

"Saya dorong Kemendagri, Dirjen Dukcapil untuk menetapkan target kapan urusan fotokopi e-KTP bisa tuntas. Jika bisa dalam hitungan satu dua bulan ini. Kemendagri mesti menugaskan Dirjen Dukcapil melakukan aksi meringankan beban rakyat dengan moto 'Tidak Perlu Focopy KTP', karena kita sudah punya KTP-el,"

Harga Cabai Naik Lagi, Aleg PKS Ingatkan Pemerintah Jaga Ketersediaan Sepanjang Tahun

KUTIPAN

Sumbawa (01/03) — Terjadinya lonjakan harga komoditi cabai pada Februari 2021 menjadi keprihatinan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan,

karena lonjakan tersebut menyebabkan terjadinya inflasi yang menurut data BPS kenaikan tersebut telah memicu inflasi pada Februari 2021 sebesar 0,1 persen.

Atas situasi ini, Johan mempertanyakan dimana kerja pemerintah dalam usaha menstabilkan harga komoditas pangan seperti cabai yang setiap tahun trend harganya selalu mengalami kenaikan.

"Saya minta Pemerintah lebih serius mengembangkan komoditas cabai menjadi komoditas unggulan nasional yang memiliki daya adaptasi dan nilai ekonomi tinggi sehingga dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat yang terus meningkat," ujar Johan.

Politisi PKS ini melihat seharusnya pemerintah bisa menanggulangi potensi kenaikan harga cabai saat ini karena pada awal tahun 2021 lalu juga telah mengalami fluktuasi harga.

"Kebutuhan cabai untuk kota-kota besar sekitar 800.000 ton per tahun atau sekitar 66.000 ton per bulannya. Karena cabai juga telah banyak digunakan dalam skala industri makanan dan minuman maka kebutuhannya terus meningkat dan harganya fluktuatif maka seharusnya pemerintah lebih serius

mengembangkan komoditas cabai agar berkontribusi pada perekonomian nasional bukan seperti yang terjadi saat ini malah menjadi penyumbang terjadinya inflasi," tutur Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI ini mengusulkan beberapa langkah strategis untuk pengembangan komoditas cabai, yaitu dengan menjaga ketersediaan cabai yang lebih merata sepanjang tahun dan mengurangi impor cabe serta peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita harus melihat fenomena fluktuasi harga cabai selalu terjadi setiap tahun sehingga harus memahami sifat unik dari komoditas cabai ini seperti mudah rusak, mudah busuk, produksinya bersifat musiman namun permintaan kebutuhan dalam keadaan segar dan dikonsumsi sepanjang tahun maka peran pemerintah menjadi sangat penting dalam tata Kelola komoditas ini supaya harganya bisa stabil sepanjang tahun", papar Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap pemerintah segera mengatasi fluktuasi harga dan fluktuasi produksi cabai yang sangat sensitif terhadap cuaca.

"Harus ada kebijakan agar ketersediaan komoditas cabai lebih merata sepanjang tahun dan tidak hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat produksi di wilayah tertentu karena konsumen cabai ini hampir merata di seluruh wilayah



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Harus ada kebijakan agar ketersediaan komoditas cabai lebih merata sepanjang tahun dan tidak hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat produksi di wilayah tertentu karena konsumen cabai ini hampir merata di seluruh wilayah NKRI"

NKRI", urai Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa NTB ini menilai sebenarnya jumlah permintaan cabai relatif tetap sepanjang tahun maka semestinya aspek produksi harus diperhatikan agar kita tidak kekurangan pasokan ketika masa panen belum tiba.

"Maka Pemerintah harus memberdayakan petani lokal

untuk mengatur manajemen produksi agar tidak terjadi fluktuasi produksi dan harga bisa lebih stabil. Selama ini pola produksi cabai sangat tidak beraturan maka saya tegaskan kepada pemerintah agar mengatur pola produksi dan stabilisasi harga cabai, apalagi menjelang Bulan Puasa dan Lebaran tahun ini harus ada antisipasi lonjakan harga," tutup Johan.

Bila Food Estate Merugikan, Anggota FPKS: Sebaiknya Dihentikan saja

KUTIPAN

Jakarta (01/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menyoroti program 'Food Estate' yang mulai menunjukkan hasilnya.

Namun, pria yang akrab disapa Akmal ini menambahkan, hasil yang didapat malah berbanding terbalik dari harapan. Bukannya semakin besar produk-produk pangan yang didapat dari program food estate, tapi malah menimbulkan kerugian.

"Program Food Estate kini tengah banyak mendapat sorotan publik. Kami di DPR RI termasuk yang konsen terhadap program ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Apabila program ini tak berhasil meningkatkan produksi pangan nasional, maka bisa saja dihentikan di tengah jalan", kata Akmal.

Anggota DPR asal Sulawesi Selatan II ini mendapat laporan, yang salah satunya informasi tentang petani bayang yang hampir seluruh tanaman bawah, khususnya bawang merah di areal Food Estate.

"Kondisinya memprihatin-

kan karena mengalami kerusakan yang hampir sama yakni mengalami kering daun dan pertumbuhannya lambat serta mengecil," ungkap Akmal.

Akmal menambahkan, bahwa bila kondisi buruk di areal food estate tidak ada perubahan dan terjadi merata di seluruh area, maka akan dikawatirkan tidak akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan dan bakal rugi, baik dari segi materi maupun tenaga.

"DPR berhak untuk menghentikan program Food Estate. Jika program tersebut tidak dapat mendorong produksi pangan nasional", tegas Akmal.

"Tentu saja bisa (dibatalkan) jika tidak sesuai. Nanti kan ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diaudit keuangan dan kinerjanya. DPR kan bisa meminta audit

husus kalau memang fakta-fakta lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan," ujar Andi Akmal menambahkan.

Andi Akmal mengungkapkan, pada saat rapat bersama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), memang banyak suara-suara yang tidak setuju dengan program Food Estate ini.

"Jadi banyak juga teman-teman (Komisi IV) yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan program Food Estate ke depannya," kata Andi Akmal.

Kendati demikian, dia meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu hasil tinjauan langsung oleh Komisi IV ke lapangan, untuk melakukan evaluasi dan menjarung permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Andi berjanji akan menginformasikan kepada publik apapun hasil temuannya nanti.

Politisi PKS ini menerangkan, pada rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan, Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

"Program Food Estate kini tengah banyak mendapat sorotan publik. Kami di DPR RI termasuk yang konsen terhadap program ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Apabila program ini tak berhasil meningkatkan produksi pangan nasional, maka bisa saja dihentikan di tengah jalan"

petani existing dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 Hektar.

"Konsen kami adalah bagaimana para petani mendapatkan manfaat dari program ini. Makanya harus jelas juga bagi kami dan perlu peninjauan lapangan untuk

memutuskan," ucap Andi.

Anggota Komisi IV ini juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganasan-keganasan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS: Impor Beras Menandakan **Tidak** **Peduli** Terhadap Petani Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (08/03) — Anggota Legislatif Komisi IV Fraksi PKS DPR RI, Hermanto menyampaikan poin penting terhadap penolakan impor beras yang dinilai dapat menggagalkan program pemerintah.

"impor beras ini mengganggu kedaulatan pangan Indonesia dan juga merugikan petani" Tegas Hermanto dalam wawancara PKS legislative report Paripurna.

Legislator PKS ini juga menjelaskan impor beras dapat menjadikan program Food Estate yang sedang gencar dijalankan oleh pemerintah dianggap gagal.

"anggaran sebesar 1 juta ton untuk dana impor beras itu sebaiknya dialihkan saja untuk membeli beras yang akan segera panen di area food estate," jelas Hermanto.

Aleg PKS ini

menyampaikan huga Persoalan dalam masa reses yang diperjuangkan adalah mengenai irigasi, pupuk, serta penyerapan pemerintah terhadap produk pertanian.

"Persoalan cuaca, longsor, banjir yang berakibat pada perluasan lahan yang tidak efektif dan tidak produktif terhadap lahan pertanian." Tegas anggota komisi IV Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, Hermanto hadir pada rapat Paripurna yang diselenggarakan di ruang Rapat Paripurna, gedung Nusantara II DPR RI.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

"impor beras dapat menjadikan program Food Estate yang sedang gencar dijalankan oleh pemerintah dianggap gagal. anggaran sebesar 1 juta ton untuk dana impor beras itu sebaiknya dialihkan saja untuk membeli beras yang akan segera panen di area food estate."

#RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



Terkait Ketersediaan Air Bersih Layak Dan Aman, Aleg PKS Dorong Kerjasama Investasi Bidang Air Minum

KUTIPAN

Tasikmalaya (08/03) --- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Senada dengan Menteri PUPR, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengatakan bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU merupakan alternatif yang baik untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

"Skema ini bagi pihak swasta pasti lebih menarik karena ada kepastian pengembalian investasi dan keuntungan. Sementara keuntungan pemerintah adalah tercapainya upaya pemenuhan akses universal air minum aman untuk masyarakat pada

tahun 2030", ungkap Toriq.

Menurutnya penyediaan akses air bersih/air minum adalah urusan pemerintah yang konkuren dan bersifat wajib. Adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Terutama disektor kesehatan dan ekonomi.

"Wabah Covid-19 menjadi peluang buat Pemerintah untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19", ungkap Politisi PKS ini.

Dalam hal ini PKS akan

mendorong peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali kelembagaan sektor air bersih untuk tercapainya ketersediaan air bersih yang berkelanjutan sekaligus layak dan aman bagi seluruh masyarakat.

"Sampai tahun 2018, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 87,75%. Namun, hanya 6,8% penduduk yang sudah menikmati akses aman. Kita punya kewajiban untuk meningkatkan aksesnya dari akses layak menjadi akses aman bagi 80,95% sisanya", ungkap Toriq.

Itu sebabnya ia menambahkan bahwa, inovasi pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi penting agar ke depan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses air bersih yang layak dan aman.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Wabah Covid-19 menjadi peluang buat Pemerintah untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19"

Aleg PKS Minta Komut Baru PT. KAI Fokus Tingkatkan Kinerja, Setelah Terpuruk Akibat Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (04/03) --- Anggota DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi kondisi PT. Kereta Api Indonesia yang mengalami penurunan kinerja serta pendapatan akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejumlah satu tahun terakhir.

Pria yang akrab disapa SJP ini berpandangan, sebetulnya banyak hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja PT KAI, diantaranya dengan melakukan efisiensi perjalanan dengan selektif memilih jadwal dan rute perjalanan yang ramai. "PT KAI juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang dengan pemberlakuan prokes Covid 19 yang cepat dan terjangkau. Selama ini masih terjadi antrian yg membuat tidak nyaman bagi penumpang dan mengkhawatirkan timbulnya penularanbx Covid 19," kata Suryadi.

Daya tarik lainnya, tambah SJP, PT. KAI bisa memberikan

promosi harga atau discount terutama untuk penumpang yang merupakan keluarga lebih dari 3-4 orang. Paket discount keluarga atau melakukan kerjasama dengan destinasi wisata dan penginapan/hotel sebagai satu paket dalam perjalanan. "Kerjasama dengan asosiasi hotel dan tempat pariwisata. Tentunya yang sudah disertifikasi pelaksanaan prokes Covid-19 yang aman, nyaman, dan sehat," ungkapnya.

Dari sisi angkutan barang, lanjut SJP, PT. KAI juga bisa melakukan promosi untuk dapat meningkatkan pendapatan melalui kereta angkutan barang, karena

selama ini pendapatan kereta angkutan barang didominasi oleh angkutan batubara.

"Dengan diangkatnya Ketua Umum PBNU, Said Agil Siradj sebagai Komisaris Utama PT KAI yang baru, maka FPKS berharap Komut Baru PT KAI dapat membantu mengangkat bisnis PT KAI yang tengah terpuruk akibat pandemi dengan memberikan masukan yang positif dan profesional bagi jajaran Direksi PT KAI," terang SJP dengan tegas.

Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat berakibat pada menurunnya kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Pada periode Januari-September 2020 PT KAI mencatatkan penurunan pendapatan angkutan dan usaha lainnya sebesar 39,67%, dari Rp 16,36 triliun menjadi Rp 9,87 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari segmen bisnisnya pendapatan angkutan barang PT KAI yang ditopang oleh angkutan batubara turun sebesar 5,52%. Sedangkan



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"PT KAI dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang dengan pemberlakuan prokes Covid 19 yang cepat dan terjangkau. Selama ini masih terjadi antrian yg membuat tidak nyaman bagi penumpang dan mengkhawatirkan timbulnya penularanbx Covid 19,"

pendapatan angkutan penumpang KAI turun 67,27% menjadi Rp 2,34 triliun dari sebelumnya Rp 7,15 triliun.

Penurunan pendapatan ini menyebabkan laba kotor KAI anjlok 97,71% menjadi hanya Rp 113,26 miliar dari

sebelumnya Rp 4,96 triliun.

Pada tahun lalu Pemerintah telah memberikan bantuan berupa PSO untuk KA Perintis sebesar Rp 159 miliar dan tahun ini dinaikkan menjadi Rp 211,7 miliar.



“Pak Jokowi sendiri menjanjikan jika akhir 2019 FIR Natuna dan Kepri akan dikuasai Indonesia, lha ini kok malah dibuka investasi asing untuk layanan navigasi keseluruhan. Maka lengkap sudah penguasaan asing atas udara Indonesia, setelah pemerintah juga mengijinkan pengelolaan bandara nasional oleh pihak asing”

Amin Ak. MM

Politisi PKS Desak Perpres 10 tahun 2021 Dicabut, Liberalisasi Investasi Sudah Kebablasan

KUTIPAN

Surabaya (05/03) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. menilai, liberalisasi investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 kebablasan.

Pasalnya, kata Amin, selain membuka kebebasan investasi industri minuman keras (sebelum akhirnya dicabut), lampiran dalam Perpres 10/2021 membuka luas investasi bagi bidang usaha yang berpotensi mengancam kedaulatan negara maupun membahayakan lingkungan.

"Padahal jauh lebih baik jika bidang usaha tersebut dikelola badan usaha dalam negeri, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain mengamankan kedaulatan negara, juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi negara. Saya percaya, langkah pembenahan yang dilakukan Menteri Erick Thohir bisa membuat lebih profesional," kata Amin.

Lebih lanjut Amin meng-

ungkapkan, sejumlah bidang usaha yang sebelumnya masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) alias tertutup dari investasi asing dan swasta kini dimasukkan ke dalam daftar positif investasi. Ia menyontohkan Industri Kimia Industri dan Bahan Perusak Ozon (BPO) yang berpotensi membahayakan lingkungan.

Bahan perusak lapisan ozon (BPO) yang dimaksud adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer. Penggunaan bahan perusak ozon perlu dihentikan karena dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon.

"Langkah ini kontraproduktif dengan upaya masyarakat dunia untuk mencegah

kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Ini jelas mengorbankan masa depan anak cucu kita," tegas Anggota Badan Legislasi DPR RI itu.

Perpres 10/2021 ini juga berpotensi membahayakan kedaulatan negara dengan kebijakan liberalisasi pada bidang usaha Pengoperasian Pelayaran Navigasi Penerbangan, Manajemen Stasiun Peman-taan dan Operasi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Sate-lit, Fasilitas Bantuan/Telekomu-nikasi Navigasi Berlayar dan Sistem Informasi Lalu Lintas Kapal (VTIS) dan Pengoperasian Terminal Penumpang untuk Transportasi Darat.

"Meliberalisasi pengopera-sian layanan navigasi penerba-ngan itu sama saja dengan menyerahkan pengelolaan ruang udara Indonesia ke pihak asing. Dan itu membahayakan kedaulatan NKRI karena kedau-latan udara dibawah kontrol pihak lain yang semestinya menjadi kewenangan sebuah negara," cetus Amin.

Amin menyontohkan pengelolaan rudang udara (flight information region) di

**AMIN AK.M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Pak Jokowi sendiri menjanjikan jika akhir 2019 FIR Natuna dan Kepri akan dikuasai Indonesia, lha ini kok malah dibuka investasi asing untuk layanan navigasi keseluruhan. Maka lengkap sudah penguasaan asing atas udara Indonesia, setelah pemerintah juga mengizinkan pengelolaan bandara nasional oleh pihak asing"

atas Natuna, Tarempa, dan Kepulauan Riau yang hingga saat ini masih dikuasai Singapura. Pengelolaan pengelolaan ruang udara Natuna dan Kepulauan Riau oleh negeri jiran tersebut hanya memperoleh sharing

US\$5 juta per tahun. Padahal potensinya jauh lebih besar jika dikelola sendiri untuk badan usaha milik nasional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Jokowi Gaungkan Benci Produk Impor, **Politisi PKS: Jangan Sampai Benci Tapi Cinta**

KUTIPAN

Jakarta (06/03) --- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk-produk Indonesia saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/3).

Bahkan dalam forum tersebut Jokowi menyampaikan, jika perlu digaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rafli mengatakan, Presiden Jokowi sudah seringkali menyatakan ajakannya kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.

"Akan tetapi ajakan tersebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang terus membuka kran impor," ungkap Rafli.

Rafli yang merupakan Anggota Legislatif asal Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I itu menambahkan pada saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR hari Jum'at, 14 Agustus 2020 saja Presiden Jokowi pernah mengatakan 'Kita harus bangga

terhadap produk Indonesia, kita harus membeli produk dalam negeri'.

"Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Jika kita lihat data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari - Oktober 2020 pemerintah melakukan impor beras sebesar 261,8 ribu ton atau setara dengan US\$149,1 Miliar sementara impor bawang sebesar 403,6 ribu ton atau setara dengan US\$395,6 Miliar," terang Rafli.

"Jangan sampai apa yang digaungkan oleh Presiden Jokowi itu tidak diikuti oleh langkah kongkrit Pemerintah untuk menghentikan impor, nanti yang ada malah bilang benci tapi cinta karena masih terus impor. Hal tersebut tentunya akan merugikan industri tanah air khususnya

industri kecil dan menengah.", tutup Rafli

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor barang konsumsi sepanjang 2020 adalah US\$ 14,66 miliar. Jauh dibandingkan barang modal (US\$ 23,7 miliar) apalagi bahan baku/penolong (US\$ 103,21 miliar).

Senada itu dalam lima tahun terakhir, impor barang konsumsi tumbuh rata-rata 6,88% per tahun. Jauh lebih cepat ketimbang pertumbuhan impor bahan baku/penolong (0,41%) dan barang modal (0,06%). Jadi ada kecenderungan di perekonomian Indonesia bahwa ada yang lebih suka jadi pedagang dan importir ketimbang industriawan.

Impor barang konsumsi terbesar adalah makanan dan minuman olahan. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai impor produk tersebut pada 2020 adalah US\$ 3,05 miliar.

Dibandingkan dengan 2019, seperti halnya pakaian jadi, memang terjadi penurunan 8,96%. Namun dalam lima tahun terakhir, rerata pertumbuhan impor produk ini adalah 2,34% per tahun.

**RAFLI**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Jangan sampai apa yang digaungkan oleh Presiden Jokowi itu tidak diikuti oleh langkah kongkrit Pemerintah untuk menghentikan impor, nanti yang ada malah bilang benci tapi cinta karena masih terus impor. Hal tersebut tentunya akan merugikan industri tanah air khususnya industri kecil dan menengah."

Jangan Hanya Andalkan Subsidi APBN, Aleg PKS Dorong Pemerintah Manfaatkan Listrik Panas Bumi Kompetitif,

KUTIPAN

Jakarta (08/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pemerintah mendorong berbagai upaya bagi penurunan biaya produksi listrik dari sumber panas bumi misalnya melalui efisiensi teknologi atau dukungan infrastruktur dan bukan mengandalkan subsidi APBN.

Menurut Mulyanto, Upaya tersebut sangat penting agar harga keekonomian listrik dari panas bumi kompetitif dibanding listrik sumber energi lain.

"PKS menilai untuk menghilangkan hambatan keekonomian harga listrik dari sumber energi panas bumi (PLTP), yang masih di atas biaya pokok pembangkitan (BPP) PLN, tidaklah serta-merta dilakukan dengan subsidi Pemerintah atau memberikan dana kompensasi listrik atas selisih biaya tersebut. Itu bukan ide yang menarik di tengah kondisi

pandemi dimana kebijakan fiskal kita fokus untuk membeli vaksin dan biaya kesehatan masyarakat," kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan dengan kondisi fiskal sekarang ini, di mana defisit APBN lebih dari 5% PDB, kurang masuk akal kalau Pemerintah harus dibebani dengan tambahan subsidi listrik panas bumi.

Menurut Mulyanto solusi yang menarik justru datang dari pihak industri, yang berupaya menurunkan biaya capital expenditure (Capex) seperti biaya infrastruktur jalan,

terutama yang bersifat sosial, yang harus dibangun pengembangan serta biaya eksplorasi yang berisiko tinggi.

Dilaporkan bahwa, PLTP Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 berhasil menurunkan belanja modal mereka sebesar 20%. Termasuk juga biaya pengeboran yang dapat ditekan di bawah angka US\$ 7 juta.

"Ini adalah prestasi yang layak diacungi jempol, karena turunnya biaya Capex secara langsung akan menurunkan harga listrik," imbuh Mulyanto.

Untuk diketahui masalah struktural lemahnya kontribusi listrik dari sumber energi panas bumi adalah harganya yang tidak kompetitif, baik dibanding listrik dari sumber energi batubara maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Harga listrik dari sumber batubara atau PLTS, bisa di bawah 7 sen per kWh, bahkan mencapai 4 sen/kWh, namun harga listrik dari sumber panas bumi sulit mencapai angka itu apalagi di bawahnya.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Upaya reduksi capex seperti ini harus mendapat dukungan pemerintah, agar sumber energi panas bumi yang merupakan harta karun nomor dua terbesar di dunia dengan potensi sebesar 24 giga watt (GW), setelah Amerika Serikat yang mencapai 30 GW dapat dioptimalkan. Karena sekarang ini kapasitas terpasang listrik panas bumi baru sekitar 9 % dari potensinya"

Namun Mulyanto berharap solusinya jangan sekedar potong kompas dengan minta dana kompensasi APBN, untuk menutupi selisih harga tersebut. Mulyanto menyarankan

sektor panas bumi belajar banyak dari PLTS, yang karena perkembangan teknologi harganya terus turun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Aleg PKS: Pemerintah **Jangan Lagi Kecolongan!**

KUTIPAN

Jakarta (07/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memperingatkan Pemerintah untuk tidak lagi kecolongan dalam melakukan tindakan awal mengantisipasi penyebaran varian corona baru.

Sebagaimana sikapnya di tahun lalu, Bukhori kembali menekankan pentingnya transparansi informasi dan kesiapan pemerintah untuk melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment).

“Berkaca dari evaluasi 1 tahun belakangan, maka sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga. Perkuat peran BNPB selaku leading sector saat ini, dan memanfaatkan data yang akurat untuk telurkan kebijakan yang saintifik dan berdampak,” ujar politisi yang sejak awal telah memperingatkan Pemerintah sebelum pandemi merebak.

“Di samping langkah teknis tersebut, ada langkah moral

yang juga tidak kalah penting. Pemerintah juga harus tegas dan konsisten menghadirkan teladan yang baik dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, hal ini berkaca pada insiden kerumunan di Maumere NTT beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja Presiden, dimana saya sangat menyesalkan hal tersebut bisa mudah terjadi dan seolah tidak ada antisipasi,” papar Bukhori.

Pemerintah, demikian Bukhori melanjutkan, dituntut konsisten dan mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Insiden di NTT adalah contoh yang kurang elok, apalagi dilakukan oleh

seorang kepala negara yang semestinya terdepan dalam memberi contoh konsistensi antara kata dan perbuatan.

Lebih lanjut, Politisi PKS ini juga mengkritik sejumlah kebijakan blunder pemerintah belakangan ini, seperti perpres terkait aturan investasi miras, sehingga menimbulkan gejala di masyarakat. Pemerintah dinilai tidak sensitif dalam mencermati situasi bangsa yang tengah membutuhkan konsentrasi dan kerja kolosal dalam menghadapi persoalan krisis kesehatan yang sampai hari ini belum menunjukkan kemajuan signifikan.

“Berkenaan dengan pencabutan perpres soal aturan investasi miras, sesungguhnya masalah tidak serta merta selesai bila Presiden menyampaikan kebijakan pencabutan tersebut hanya secara lisan,” ungkapnya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, sambungna, Presiden juga harus menekan perpres baru yang menetapkan miras adalah komoditi yang tertutup bagi investasi.

“Sebab, publik akan tetap



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Berkaca dari evaluasi 1 tahun belakangan, maka sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga. Perkuat peran BNPB selaku leading sector saat ini, dan memanfaatkan data yang akurat untuk telurkan kebijakan yang saintifik dan berdampak”

menaruh curiga dengan keputusan menggantung tersebut,” imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PKS ini juga menganggap pemerintah seolah kehilangan arah dan fokus dalam menangani krisis

pandemi akibat sederet keputusan di tengah masyarakat yang justru ditimbulkan oleh internal istana.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg FPKS: Jemaah Haji Indonesia Akan Disiapkan Untuk Divaksin dan Berangkat Haji

KUTIPAN

Jakarta (8/03) — Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Iskan Qolba Lubis membeber-

kan rencana isu Komisi VIII yang akan dibahas pada Masa Sidang ke-IV DPR RI Tahun 2020/2021 dan membagikan cerita pengalamannya dari Masa Reses ke-III.

Legislator PKS dari Dapil Sumatera Utara II itu menyoroti permasalahan ibadah haji di tengah wabah Covid-19 yang masih berlangsung. Iskan menjelaskan akan memastikan jemaah haji Indonesia agar siap divaksin dan dapat menunaikan ibadah rukun kelima tersebut di tanah suci.

"Isu pertama kita ini tentang haji, jadi kita berharap kita akan mengundang menteri agama dan menteri kesehatan untuk memastikan supaya jamaah haji kita, kita siapkan untuk divaksin dan kita beritahu Saudi Arabia bahwa jamaah kita

siap untuk diberangkatkan, itu isu besarnya untuk saat ini," ujarnya.

Magister Bahasa Arab dari Pakistan tersebut juga membagikan cerita pengalamannya menyerap aspirasi yang ia dapatkan dari Dapil pada masa reses kali ini.

"Pertama memang masyarakat pingin sih supaya pendidikan di daerah itu dibuka ya, karena banyak anak-anak ketika mereka tidak sekolah mereka justru pergi kemana-mana, justru lebih tidak terkontrol, itu permintaan mereka di daerah, supaya khusus pesantren-pesantren dibolehkan SMP-SMA tetapi tentunya tetap dengan protokol kesehatan ya, itu yang kita perjuangkan ya." tutup Iskan.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

Isu pertama kita ini tentang haji, jadi kita berharap kita akan mengundang menteri agama dan menteri kesehatan untuk memastikan supaya jamaah haji kita, kita siapkan untuk divaksin dan kita beritahu Saudi Arabia bahwa jamaah kita siap untuk diberangkatkan, itu isu besarnya untuk saat ini

**Kurniasih
Mufidayati**

Menyoal Vaksin Mandiri, Wakil Ketua FPKS Minta Transparansi Pemerintah

KUTIPAN

Jakarta (01/03) --- Pemerintah resmi memberikan izin program vaksin mandiri dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021.

Vaksin ini dikenal dengan vaksin gotong royong. Kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari Netty Prasetyani Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS.

"Pemerintah perlu transparan dan terbuka menjelaskan vaksin mandiri ini untuk mempercepat apa? Apakah sasarannya di luar 181 juta peserta? Atau apa? Pemerintah kan sudah menetapkan 70 persen populasi ini untuk mencapai immunity sebagai basis tujuan vaksinasi dan menjamin gratis. Apalagi pengusaha juga belum memberikan data peserta vaksinasi ini," kata Netty dalam keterangan media, Senin (01/03)

Ketua DPP PKS ini menekankan kalau program ini hanya mengejar target 181 juta penerima vaksin, maka berpotensi redundand dalam penganggaran.

"Keterangan Kemenkes saat rapat dengan Komisi IX beberapa waktu lalu, 181 juta peserta vaksin itu dikonversikan menjadi kebutuhan dosis vaksin yang pengadaannya menggunakan APBN. Jangan sampai segelintir orang mendapatkan keuntungan, sementara negara dirugikan," terangnya.

Dalam beberapa kesempatan Menkomarves menyampaikan bahwa vaksin mandiri memakai vaksin sinopharm di luar vaksin program pemerintah dan akan melakukan pemesanan dalam waktu dekat.

"Jika vaksin gotong royong ini menggunakan sinopharm dan lainnya Pemerintah harus membuktikan secara terbuka skemanya bagaimana, keterseediaan sinopharm berapa, kapan datang, dan bagaimana implementasinya?" lanjut legislator asal Jawa Barat ini.

PMK nomor 10 tahun 2021 menjadi dasar pemerintah untuk memberikan kewenangan yang besar kepada pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi dari hulu hingga hilir.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar pengusaha dan perusahaan yang mengikuti program ini harus menjamin bahwa vaksin bagi karyawan dan keluarganya ini gratis dan tidak memotong gaji pekerja. Kedua, jangan sampai ada oknum pemburu rente yang tidak bertanggung jawab, bahkan memperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi atau bahkan terbuka kepada masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya.

"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan mulai dari proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan sebagaimana disebut dalam aturan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pemerintah perlu transparan dan terbuka menjelaskan vaksin mandiri ini untuk mempercepat apa? Apakah sasarannya di luar 181 juta peserta? Atau apa? Pemerintah kan sudah menetapkan 70 persen populasi ini untuk mencapai immunity sebagai basis tujuan vaksinasi dan menjamin gratis. Apalagi pengusaha juga belum memberikan data peserta vaksinasi ini,"

Aleg PKS: Masih Banyak Penanganan Covid-19 yang **Harus Dievaluasi**

KUTIPAN

Jakarta (08/03) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 yang telah memasuki usia satu tahun masih harus dievaluasi dan ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya angka pasien COVID-19 di Indonesia.

"Meski sudah tidak setinggi kemarin, tapi masih banyak penanganan COVID-19 di Indonesia yang harus ditingkatkan. Ditambah lagi dengan temuan varian baru B.117 yang juga harus diklarifikasi pada Kemenkes." Tegas Mufida dalam PKS Legislative Report edisi Paripurna.

Mufida juga menambahkan bahwa evaluasi terhadap efek pandemi bagi para pekerja masih harus dilakukan.

"Kita juga harus

membahas tentang dampak pandemi setelah satu tahun ini bagi pekerja. Jadi kita harus melakukan rapat secara intensif dengan Kemnaker untuk melihat angka penurunan pendapatan. Dan juga, situasi pekerja setelah 1 tahun pandemi harus kita evaluasi dan harus ada stimulus yang diberikan oleh Kemnaker untuk teman-teman pekerja bangkit kembali secara ekonomi." Ucap Mufida.

Mufida mengatakan bahwa Komisi IX akan berkoordinasi dengan direksi

berserta Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mengingat isu Kesehatan yang masih menjadi topik utama pembahasan Komisi IX di masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

Adapun selama masa reses, Mufida telah melakukan koordinasi dengan pihak pengelola rumah sakit swasta terkait dengan tagihan pasien COVID-19.

"Kita juga bernibincang dengan pengelola rumah sakit swasta dan dokter-dokter. Saat ini kita prihatin tagihan rumah sakit swasta masih sangat tinggi untuk pasien COVID-19. Pemerintah harus segera membayarkan tagihan-tagihan pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit. Karena, pasti sangat berat biaya operasional rumah sakit kalau tidak segera dibayarkan." Tutur Mufida.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Evaluasi terhadap efek pandemi bagi para pekerja masih harus dilakukan.

Kita juga harus membahas tentang dampak pandemi setelah satu tahun ini bagi pekerja. Jadi kita harus melakukan rapat secara intensif dengan Kemnaker untuk melihat angka penurunan pendapatan. Dan juga, situasi pekerja setelah 1 tahun pandemi harus kita evaluasi dan harus ada stimulus yang diberikan oleh Kemnaker untuk teman-teman pekerja bangkit kembali secara ekonomi.

Anggota FPKS: Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-Besaran

KUTIPAN

Jakarta (07/03) ---
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan.

Kondisi itu memudahkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah ditengah kondisi pandemi saat ini. Beberapa tahun lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus korupsi yang mencoreng citra otoritas pajak.

Tidak seperti fenomena Gayus Tambunan saat ini malah diduga melibatkan oknum petinggi Direktorat Jenderal Pajak.

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.

"Di tengah kesulitan pandemi kembali terjadi kasus dugaan suap puluhan miliar yang menyengsarakan rakyat, uang yang harusnya masuk ke kas negara demi kesejahteraan rakyat" dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (05/03/2021)

Disisi lain, Anggota DPR RI Komisi XI ini menambahkan, legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan.

"Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik, ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, dan kinerja yang baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani publik," ujar Anis.

Menurutnya perlu evaluasi besar besaran dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah.

"Data shortfall pajak setiap tahun yang tidak kunjung membaik bisa jadi indikator adanya permasalahan segera harus dibenahi, pengawasan internal dari Kementerian Keuangan perlu diperkuat"

katanya.

Menurut Anis masalah shortfall penerimaan perpajakan ini tidak hanya terjadi tahun 2020 efek pandemi Covid-19.

"Bahkan bisa kita lihat shortfall pajak di tahun 2018 mencapai Rp108,1 triliun dan di tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun," ujarnya.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I



Legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan. Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik, ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, dan kinerja yang baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani publik

Anggota FPKS Minta KPK **Usut** **Tuntas** Kasus Suap Pajak

KUTIPAN

Jakarta (04/03) —
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
sedang menyelidiki
dugaan kasus suap
yang melibatkan
pejabat di Direktorat
Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian
Keuangan.

Menyikapi hal itu, Anggota
Komisi XI DPR RI Fraksi PKS,
Junaidi Auly mengatakan
dengan tegas agar KPK segera
mengusut secara tuntas kasus
dugaan suap di lingkungan DJP
Kemenkeu.

"Dugaan kasus ini harus
diusut secara tuntas, sangat
disayangkan ada suap pajak
disaat realisasi penerimaan
negara sedang anjlok," ujar
Junaidi dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Kamis

(04/03)

Data yang dilansir
Kementerian Keuangan
mencatat realisasi penerimaan
perpajakan 2020 mencapai Rp
1.070,0 triliun atau 89,3 persen
dari target APBN, angka
tersebut kontraksi 19,7 persen
dibandingkan realisasi tahun
2019 sebesar Rp 1.332,7
triliun.

"Bagaimana mungkin
meningkatkan penerimaan
pajak secara masif ketika masih
ada ruang terhadap penyuapan
pajak, dugaan kasus ini
tentunya dapat berdampak
pada tingkat kepercayaan wajib
pajak terhadap DJP" ungkap
Junaidi.

Politisi dari Dapil Lampung
II ini menuturkan kasus
dilingkungan DJP tentu menjadi
peringatan keras.

"Harus ada evaluasi
menyeluruh sehingga kejadian
tersebut tidak berulang
dikemudian hari", tutup Junaidi.



Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI



Bagaimana mungkin meningkatkan penerimaan pajak secara masif ketika masih ada ruang terhadap penyuapan pajak, dugaan kasus ini tentunya dapat berdampak pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap DJP



Sebagai Wakil Ketua
Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) DPR RI

Legislator PKS Anis Byarwati **Dilantik** sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI

KUTIPAN

BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 t, pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G . Dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara, berfungsi untuk melakukan penelaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Jakarta (08/03) — Bertepatan dengan hari Perempuan Internasional, Anis Byarwati dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) - Komisi XI, ditetapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufrmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2019 - 2024, di ruang BAKN DPR RI Gedung Nusantara 1, menggantikan Ahmad Syaikh.

Anggota Legislatif (Aleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil)

DKI 1 Jakarta Timur ini, menjadi perempuan pertama yang duduk sebagai Wakil Ketua sekaligus anggota BAKN DPR RI hingga saat ini.

BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 t, pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G . Dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara, berfungsi untuk melakukan penelaahan

terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat terhadap DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Ditemui usai pelantikan, Doktor Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga Surabaya ini mengatakan bahwa, BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

"Pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan dan akuntabel, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia," harap Anis dengan tegas.



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Wakil Ketua BAKN DPR RI

"BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. "Pengelolaan keuangan negara dapat lebih transparan dan akuntabel, dan tentu saja tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia,

Interupsi di Paripurna DPR, Muzammil PKS: **Cabut Draf** Peta Jalan Pendidikan!

KUTIPAN

Jakarta (8/03) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf mengkritisi konsep peta pendidikan yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan diluncurkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Catatan kami ada dua hal, pertama catatan teknis dan kedua catatan substansi, catatan teknis kami ingin mengingatkan kepada Kemendikbud untuk merujuk pada Undang-Undang (UU) 15 2019 tentang Perubahan UU 12 2011, yaitu Perpres hanya mungkin dimunculkan manakala ada perintah UU dan perintah Peraturan Pemerintah. Jika tidak ada itu maka prepres tidak bisa dibuat," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (8/03).

Legislator dari Dapil Lampung I tersebut menambahkan, mengenai aspek substansi, sejak awal peta jalan ini diajukan konsep yang telah dibuat oleh

Kemendikbud tidak sesuai dengan namanya. Arah peta jalan dari titik tolak dan arahnya sudah tidak bertolak dari konstitusi dan berarah pada visi konstitusi, yaitu pasal 31 ayat 3 yang merupakan produk dari Reformasi.

"Contoh yang saya maksudkan adalah ketika Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan —red) menyebutkan dalam peta jalan itu, profil pelajar pancasila yang dikutip dari konstitusi dan UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional —red) hanyalah akhlak mulia dan aspek kecerdasan, padahal UUD produk Reformasi pasal 31 ayat 3 dan UU 20 2003 jelas sekali mengutip lengkap amanat konstitusi yang

berbunyi," sambungnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menerangkan, amanat konstitusi yang dimaksudkan adalah 'pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU'. Ia juga menyayangkan, Kemendikbud sejak awal pembentukan peta jalan telah keluar dari amanat.

"Kami khawatir, back main mindset dari pembuatan yang disebut Peraturan Presiden atau peta jalan ini memang sejak awal sudah tidak merujuk kepada semangat konstitusi dan UU pendidikan. Oleh karena bertentangan dengan teknis dan bertentangan dengan substansi, maka melalui forum ini kami meminta untuk Pimpinan DPR meminta kepada Kemendikbud untuk mencabut peta jalan tersebut, karena secara teknis tidak diperintahkan oleh UU, dan secara substansi bertentangan dengan konstitusi dan UU Pendidikan Sisdiknas." pungkas Muzammil.



Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi I DPR RI

"Kami khawatir, back main mindset dari pembuatan yang disebut Peraturan Presiden atau peta jalan ini memang sejak awal sudah tidak merujuk kepada semangat konstitusi dan UU pendidikan. Oleh karena bertentangan dengan teknis dan bertentangan dengan substansi, maka melalui forum ini kami meminta untuk Pimpinan DPR meminta kepada Kemendikbud untuk mencabut peta jalan tersebut, karena secara teknis tidak diperintahkan oleh UU, dan secara substansi bertentangan dengan konstitusi dan UU Pendidikan Sisdiknas"



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Atasi Kekurangan Air Bersih Saat Kemarau, Rofik **Resmikan** Bantuan Sumur Bor di Dapil

KUTIPAN

Purbalingga (01/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto meresmikan bantuan sumur bor di Dukuh Tlaga Desa Wlahar Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga pada Senin (01/03).

Sumur bor sedalam 125 meter ini merupakan bantuan program aspirasi Jerjasama antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM tahun 2020.

"Insya Allah kalau musim kemarau wilayah ini tidak lagi mengalami kekeringan dengan adanya sumur bor ini. Air yang dikeluarkan adalah air sehat. Anggarannya hampir Rp 350 juta sehingga harus dirawat sebaik-baiknya," pesan Rofik saat peresmian sumur.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VII ini menjelaskan, sumur bor ini adalah salah satu aspirasi Dapil VII. Yang mengajukan sumur bor diakui banyak wilayah namun yang mendapat adalah Desa Wlahar.

"Saya bersyukur sekali sumur ini sudah bisa dimanfaatkan warga. Saya berharap kepada masyarakat untuk bisa menjaga, memelihara dan merawat sumur bor ini agar bisa dimanfaatkan terus sepanjang tahun," kata Rofik.

Kades Wlahar Ali Murtopo menyampaikan terima kasih kepada Rofik yang telah memperjuangkan aspirasi warganya sehingga impian selama ini untuk mempunyai sumur bor bisa terwujud.

"Kami berharap bantuan ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Karena di Desa Wlahar masih ada 4 grumbul yang selalu kesulitan mendapatkan air bersih setiap kali datang musim kemarau,"

katanya.

Dia mengatakan, dengan adanya sumur bor ini maka sebanyak 43 keluarga di Dukuh Tlaga bisa menikmati air bersih.

"Saya mewakili 1.018 warga Wlahar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto," katanya.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Purbalingga FPKS Samarsih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya.

"Terima kasih kepada Bapak Rofik Hananto yang sudah merealisasikan sumur bor ini," katanya.

Menurut Samarsih, masyarakat Wlahar sangat membutuhkan air bersih saat musim kemarau. Selama ini warga Desa Wlahar sudah beberapa kali mengajukan permohonan sumur bor namun tidak terealisasi.

"Karena itu kami menyampaikan terima kasih karena aspirasi sumur bor ini terwujud melalui anggota Fraksi PKS DPR RI Bapak Rofik Hananto," katanya.



H. ROFIK HANANTO, S.E.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Insya Allah kalau musim kemarau wilayah ini tidak lagi mengalami kekeringan dengan adanya sumur bor ini. Air yang dikeluarkan adalah air sehat. Anggarannya hampir Rp 350 juta sehingga harus dirawat sebaik-baiknya"



Reses, Junaidi Auly Berikan Paket Bahan Pokok pada Warga Terdampak Covid-19

KUTIPAN

Lampung (08/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Lampung Junaidi Auly melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kebijakan Stimulus OJK kepada masyarakat terdampak Covid-19 secara 'Door to Door' di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Junaidi mengatakan, penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka edukasi ke masyarakat terkait berbagai kebijakan stimulus OJK dalam menghadapi Covid-19.

"Harapannya masyarakat terbantu dengan edukasi kebijakan stimulus ini sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin," ujar Junaidi di Desa Mulyojadi, Gunung Terang, Tulang Bawang, Senin, (08/03)

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XI DPR ini juga membagikan paket bahan pokok kepada masyarakat sebanyak 540 paket yang

disebar ke Desa Mulyojadi kecamatan Gunung Terang, Desa Margasari kecamatan Batu Putih, dan Desa Kibang Tri kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang.

Diantara penerima paket bahan pokok yaitu buruh harian, supir, ojek, ibu rumah tangga, hingga petani.

"Selain memberikan edukasi, kami juga mendistribusikan paket bahan pokok kepada masyarakat. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban masyarakat," tutur Junaidi.



Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka edukasi ke masyarakat terkait berbagai kebijakan stimulus OJK dalam menghadapi Covid-19. Harapannya masyarakat terbantu dengan edukasi kebijakan stimulus ini sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin



Syahrul Aidi **Resmikan** Program Padat Karya Tunai PKT Kemenhub di Tembilahan

KUTIPAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (08/03), diikuti juga oleh Bupati Inhil HM Wardan, Kepala Distrik Navigasi wilayah I Dumai sebagai Induk dari Kepala Kesyahbandaran Operasional Pelabuhan (KSOP) wilayah Tembilahan, perwakilan DPRD Inhil, Perwakilan Polres Inhil.

Tembilahan (08/03) — Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maaat, meresmikan kegiatan program Padat Karya Tunai (PKT).

PKT, kata Syahrul, jadi solusi negara untuk menstabilkan perekonomian Nasional pada masa pandemi Covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (08/03), diikuti juga oleh Bupati Inhil HM Wardan, Kepala Distrik Navigasi wilayah I Dumai sebagai Induk dari Kepala Kesyahbandaran Operasional Pelabuhan (KSOP) wilayah Tembilahan, perwakilan DPRD Inhil, Perwakilan Polres Inhil.

Kadisnav Wilayah I Dumai Raymon Ivan melaporkan bahwa kegiatan PKT ini menciptakan lapangan kerja sementara di tengah masa pandemi ini, pengentasan pengangguran, pengentasan kemiskinan.

"Kita merekrut 100 orang tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Ini komitmen Kemenhub melalui Dirjen Hubungan Laut mendukung perekonomian masyarakat. Swakelola ini melibatkan masyarakat yang diawasi oleh tenaga terlatih." kata Raymond.

Sementara itu Bupati Inhil, HM Wardan, mengucapkan

terima kasih kepada Kemenhub dan kedatangan Syahrul Aidi di Kabupaten Inhil. Dia menyampaikan program PKT ini akan sangat membantu warga Inhil di tengah masa pandemi.

Syahrul Aidi menerangkan bahwa Program PKT merupakan Program Strategis Nasional (PSN) pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikawal oleh Komisi V di seluruh mitra komisinya.

"PKT ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jika selama ini kontraktual, dana masuk ke sekelompok orang, ada keuntungan yang mereka ambil, maka melalui PKT ini dana langsung diserap oleh masyarakat. Langsung masuk ke kantong masyarakat" terang Syahrul.

Syahrul Aidi yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI ini juga tidak lupa berpesan setiap aktifitas PKT ini mengikuti protokol kesehatan.



H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"PKT ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jika selama ini kontraktual, dana masuk ke sekelompok orang, ada keuntungan yang mereka ambil, maka melalui PKT ini dana langsung diserap oleh masyarakat. Langsung masuk ke kantong masyarakat"





اللهم بلغنا رمضان

سالمين معافين موفقين مباركين
صائمين قائمين معتكفين محتسبين
مغفورين ما تقدم من الذنوب

برحمتك يا أرحم الراحمين

Dukung Petani Kopi, Sakinah Berikan Bantuan Ribuan Bibit

KUTIPAN

Kabupaten Buol
(08/03) --- Anggota
DPR RI dari Fraksi
Partai Keadilan
Sejahtera, Sakinah
Aljufri,

memberikan bantuan bibit kopi kepada para petani di kecamatan Karamat, Kabupaten Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Penyerahan bantuan bibit kopi secara simbolis sebanyak 1.500 pohon bibit kopi unggulan bersertifikat.

"Bantuan bibit kopi unggulan ini merupakan salahsatu upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ucap Sakinah.

Di Kabupaten Buol sendiri, kawasan yang diperuntukkan perkebunan sangat luas, lebih dari 86 ribu hektar. Pemilihan pemberian bibit kopi karena merupakan tanaman tahunan yang umur produktifnya dapat

mencapai 20 tahun. Juga merupakan tanaman yang relatif mudah perawatannya.

"Komoditas tanaman kopi di Kabupaten Buol memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, juga dapat menciptakan lapangan kerja, berkebun kopi juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan," ucap Legislator PKS asal Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan ini ketua DPD PKS Kabupaten Buol Zainal Abidin menyampaikan bibit kopi yang diberikan Sakinah harus ditanam dengan benar serta dirawat dengan baik agar hasilnya melimpah.

"Hasil panen dari berkebun kopi nantinya insyaAllah mencapai 5 sampai 10 juta rupiah per bulan, dengan bibit unggul ini," tegas Zainal.

Penyerahan bantuan bibit kopi ini didampingi oleh ketua DPD PKS Kabupaten Buol Zainal Abidin dan tokoh masyarakat serta perangkat desa dari beberapa Kelurahan di Kabupaten Buol.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Komoditas tanaman kopi di Kabupaten Buol memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, juga dapat menciptakan lapangan kerja, berkebun kopi juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan

Reses di Dafil, Alifudin Bertemu Bupati Sambas dan Mendengar Aspirasi OPD

KUTIPAN

Kabupaten Sambas (05/03) --- Dalam perjalanan Reses Perorangan Anggota DPR RI Dafil Kalimantan 1, Alifudin

Aspirasi yang disampaikan Bupati Sambas beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesehatan ini berharap, Alifudin bisa menyerap dan menyuarakan pada saat masa sidang di DPR RI.

"Hari ini kami, bersilaturahmi dengan Bupati Sambas, dan membahas tentang Balai Latihan Kerja untuk tenaga kerja yang nantinya akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), agar memiliki skill yang nanti tidak hanya jadi buruh kasar" Ucap Legislator Fraksi PKS, Alifudin, (01/03/2021).

Pada silaturahmi tersebut, permasalahan kesehatan menjadi perhatian utama, karena peningkatan pelayanan

kesehatan di daerah perbatasan harus diprioritaskan, seperti pembangunan Rumah Sakit Terpadu di daerah perbatasan.

"Di masa Pandemi Covid 19 ini, pelayanan kesehatan di setiap daerah akan terlihat, SDM, sarana dan mutunya. Apalagi di daerah perbatasan seperti sambas yang butuh perhatian khusus dari Pemerintah Pusat" tambah Alifudin.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula lembaga-lembaga terkait seperti, BPJS Kesehatan, BP2MI, BPOM, BKKBN, dan Dinas Kabupaten Sambas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesehatan.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dafil Kalimantan Barat I



"Hari ini kami, bersilaturahmi dengan Bupati Sambas, dan membahas tentang Balai Latihan Kerja untuk tenaga kerja yang nantinya akan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), agar memiliki skill yang nanti tidak hanya jadi buruh kasar

Reses di Depok, Aleg PKS ajak Masyarakat **Kenali** Pahlawan Asli Kota Depok

KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., ajak pemerintah bersama masyarakat untuk kembali angkat pahlawan asli Kota Depok, Tole Iskandar

Menurut Nur Azizah, tidak sedikit masyarakat Kota Depok yang belum tahu siapa itu Tole Iskandar, serta agar generasi muda tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan. Hal itu disampaikan Nur Azizah dalam agenda Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2020-2021 pada Sabtu (27/2) di kediaman salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

“Tole Iskandar adalah pahlawan asli dari Kota Depok, generasi muda saat ini, khususnya yang ada di Depok harus mengenal lebih dekat sejarah dan perjuangan pahlawan asli Kota Depok ini. Hal itu juga sebagai salah satu bentuk memperkokoh rasa nasionalisme di kalangan anak muda”, jelas Nur Azizah.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah menyerap aspirasi dari salah satu tokoh senior Kota Depok, Titiek Haryati. Titiek yang merupakan sekretaris Dewan Harian Cabang ‘45 (DHC45) Kota Depok. DHC 45 sendiri merupakan organisasi yang giat dan aktif menyebarkan nilai-nilai perjuangan yang dikumandangkan para pahlawan terdahulu. Titiek menuturkan bahwa anak-anak muda saat ini masih kurang antusias untuk mempelajari sejarah dan mengenal para pahlawan pejuang negeri ini, khususnya di Kota Depok.

“Kita memiliki tokoh pahlawan asli Kota Depok bernama Tole Iskandar, yang saat ini juga diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Kota Depok. Namun tidak semua anak muda saat ini menyadari

kalau Tole Iskandar itu diambil dari nama salah satu pahlawan asli Kota Depok”, jelas Titiek.

Menurut Titiek, awalnya pemerintah itu kurang memberikan perhatian. Hingga dirinya besama DHC 45 Kota Depok yang mendorong pemerintah agar terus mendukung setiap kegiatannya. Salah satunya untuk terus mengedukasi masyarakat tentang sejarah perjuangan para pahlawan.

“Jadi DHC 45 ini merupakan yang pertama-tama mengajak Dinsos dan Kesbangpol Kota Depok untuk terus mengenang sejarah perjuangan Tole Iskandar. Namanya itu sudah di proklamirkan sebagai nama jalan di Depok. Jadi setiap tahun di tanggal 10 November, habis upacara kita ada napak tilas di kediaman Tole Iskandar, sarasehan di daerah Ratujaya, disitu kita mengundang anak-anak sekolah di Depok untuk hadir melakukan napak tilas dan dihadiri oleh Kesbangpol dan Dinsos. Itu sebagai upaya kami agar anak-anak muda jangan sampai melupakan sejarah”, imbuhnya.

Namun, perempuan yang sudah tinggal di Depok sejak tahun 1979 ini turut



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Tole Iskandar adalah pahlawan asli dari Kota Depok, generasi muda saat ini, khususnya yang ada di Depok harus mengenal lebih dekat sejarah dan perjuangan pahlawan asli Kota Depok ini. Hal itu juga sebagai salah satu bentuk memperkokoh rasa nasionalisme di kalangan anak muda”,

menyayangkan, saat ini upaya yang masih kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, “Saat terakhir kita berkunjung ke makam Tole Iskandar, itu makamnya sudah rusak, pecah-pecah. Perlu ada upaya pemerintah

untuk terus merawatnya. Tidak hanya itu, banyak juga pahlawan-pahlawan lain yang terlupakan, karena tidak dimakamkan di makam pahlawan”, ungkap Titiek.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Tifatul Sembiring 
@tifsembiring



Musuh menyerang dari depan, namun pengkhianat menusuk dari samping. Ironisnya, pengkhianatan itu bukan dilakukan musuh, melainkan oleh teman dekat yg engkau percayai, cintai, tolongi dan itu semua kau lakukan tanpa pamrih ~ Angkhu Dhen.

12.41 PM · 7 Mar 2021 · Twitter for iPad

Sekolah Lapangan, Sebagai Cara Slamet **Dorong** **Pengembangan** Petani Sukabumi

KUTIPAN

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPTP Jawa Barat, Kepala BPP Jampang Tengah, Kepala Desa Bantar Agung, dan Bhabinkamtibmas Bantar Agung.

Sukabumi (05/03) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet konsisten mendorong pengembangan petani di Sukabumi.

Kali ini, legislator asal Sukabumi tersebut menggelar kegiatan Sekolah Lapangan bagi para petani di Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.

"Varietas padi unggul dengan demplot 10 hektar menjadi fokus kita di kegiatan Sekolah Lapangan ini," kata Slamet, Kamis, (04/03/2021).

Dalam kegiatan itu Slamet juga menggandeng Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian atau BPTP Jawa Barat agar kegiatan tersebut berjalan optimal.

"Kami berharap dengan kegiatan ini para petani bisa lebih mengembangkan lagi produk yang dihasilkannya," jelas Slamet.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPTP Jawa Barat, Kepala BPP Jampang Tengah, Kepala Desa Bantar Agung, dan Bhabinkamtibmas Bantar Agung.



drh. H. SLAMET

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV



Varietas padi unggul dengan demplot 10 hektar menjadi fokus kita di kegiatan Sekolah Lapangan ini, Kami berharap dengan kegiatan ini para petani bisa lebih mengembangkan lagi produk yang dihasilkannya

Baksos di Indramayu, Netty Ingatkan Pemerintah Agar Lakukan Pendekatan Promotif Kesehatan

KUTIPAN

Indramayu (05/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, bersama Satgas Penanganan Bencana DPD PKS Kab Indramayu melakukan baksos pemeriksaan kesehatan dan penyerahan bantuan obat-obatan bagi korban banjir

di Desa Kongsijaya, Kec Widasari dan Desa Parean Girang, Kec Kandanghaur Kab Indramayu, Jum'at (05/03)

Menurut Netty, sistem kesehatan Indonesia masih berbasis pada pelayanan kuratif yang berbiaya tinggi.

"Kedepannya, pemerintah harus mengevaluasi sistem kesehatan masyarakat agar berbasis pada pendekatan promotif dan preventif, bukan kuratif yang berbiaya mahal. Jika masih berbasis pada kuratif, sistem kesehatan kita akan menyedot anggaran yang besar dan menjadi beban negara. Peran puskesmas dalam melakukan promosi kesehatan harus terus ditingkatkan.

Rakyat harus dididik untuk hidup sehat dan bersih agar tidak mudah sakit," papar Netty.

Terkait dengan baksos kesehatan yang dilakukan Satgas PKS, menurut Netty, pelayanan kesehatan dan sosial terhadap rakyat adalah tugas pemerintah, namun PKS bersedia turun membantu demi meringankan penderitaan rakyat.

"Layanan kesehatan dan sosial oleh Satgas Penanganan Bencana ataupun melalui Pusat Pelayanan adalah bentuk komitmen PKS yang menyiagakan partai sebagai pelayan rakyat. Kerja pelayanan dan advokasi harus menjadi DNA kader sehingga rakyat melihat bukti komitmen tersebut," katanya.

Menurut Netty, keterbatasan pemerintah dalam mengatasi persoalan kesehatan masyarakat menjadi ruang bagi PKS untuk mengambil hati masyarakat dengan kerja pelayanan.

"Kader PKS harus hadir di tengah masyarakat dan mengisi ruang-ruang publik di legislatif dan eksekutif agar lebih luas dalam melayani masyarakat karena ditopang oleh kewenangan dan anggaran negara," kata Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial.

Netty juga mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi baksos.

"Jaga kesehatan dan protokol kesehatan 3M harus tetap dilakukan, mengingat varian baru corona sudah masuk di Indonesia. Kita harus bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan 3M" katanya.

Terakhir Netty meminta pemerintah yang berwenang untuk membantu masyarakat Indramayu yang terkena dampak banjir secara lebih sigap dan menyeluruh.

"Kebutuhan masyarakat



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Sistem kesehatan Indonesia masih berbasis pada pelayanan kuratif yang berbiaya tinggi. Kedepannya, pemerintah harus mengevaluasi sistem kesehatan masyarakat agar berbasis pada pendekatan promotif dan preventif, bukan kuratif yang berbiaya mahal"

harus segera dipenuhi mengingat mereka menghadapi dua bencana, yaitu bencana alam berupa banjir dan bencana non-alam yakni COVID-

19. Jangan biarkan masyarakat menunggu-nunggu bantuan tanpa adanya uluran tangan dari pemerintah" katanya.



Profil

- Nama Lengkap
DR. H. Abdul Fikri Faqih
- Tempat, Tanggal Lahir
Tegal, 17 Juli 1963
- Dapil
Jawa Tengah IX (Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal)



Pendidikan

- **SMA Negeri Slawi**, Tegal, Jawa Tengah
- **S1 Teknik Elektro, IKIP Semarang**
- **S2 Manajemen**, Univ. Muhammadiyah Surakarta
- **S3 Ilmu Lingkungan**, Univ. Diponegoro



Riwayat Organisasi

- **Wakil Ketua PDPII**, Kabupaten dan Kota Tegal
- **Ketua Ikatan Remaja Masjid Al Huda**, Semarang
- **Wakil Ketua Pengurus Wilayah PII**, Jawa Tengah
- **Pembina Yayasan Ulin Nuha**
- **Ketua DPD PKS Kabupaten Tegal**
- **Ketua Daerah Dakwah Lima DPW PKS Jawa Tengah**
- **Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Tengah**
- **Sekretaris Wilda Jatijaya DPP PKS**



ABDUL FIKRI FAQIH

f : **Fikri Faqih** t : **@FikriFaqih**
i : **@afikrifaqih** l : **http://fikrifaqih.com**



Keluarga

- Istri : **Zubaedah**
- Anak : **5 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Guru PNS**, Kota Tegal
- **Guru Madrasah Aliyah NU Al Imam Adiwerna**, Tegal
- **Kepala STM Muhammadiyah** Tegal, Jawa Tengah
- **Sekretaris Komisi A DPRD** Kabupaten Tegal
- **Anggota Komisi A DPRD** Provinsi Jawa Tengah
- **Wakil Ketua DPRD** Provinsi Jawa Tengah
- **Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Aleg FPKS Minta Pemerintah Buat Kebijakan Moratorium Pendirian Pabrik Semen Baru

KUTIPAN

Padang (06/03) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menerima kunjungan dari Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-ISI)

yang diwakili Ketua Umum FSP-ISI Kiki Warlansyah dan didampingi Fasil Arif MN FSP-ISI, Nino Perdana Bidang Organisasi FSP-ISI dan Wahyudi Ketua Komisariat SPSP di tempat kediamannya di Padang (04/03/2021).

Pada pertemuan silaturahmi tersebut pengurus FSP ISI menyampaikan aspirasinya terkait dengan kondisi Industri Semen Nasional saat ini yang sudah mengalami oversupply sebesar 42 Juta Ton dan menyampaikan penolakan atas rencana Pembangunan Pabrik Semen Baru di Kalimantan Timur dengan kapasitas 15 Juta Ton.

"Saya meminta kepada pemerintah untuk dapat menerima masukan dan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Industri Semen

Indonesia, karena akan menjaga stabilitas harga maupun pasokan semen di Indonesia. Kalau Over Penawaran, maka tidak akan sehat dalam tata niaga semen", tutur Nevi.

Penolakan FSP-ISI atas pembangunan pabrik semen baru ini bukan tanpa alasan, Oversupply 42 Juta Ton saat ini saja sudah menyebabkan utilisasi pabrik hanya 66% artinya sudah ada beberapa line pabrik dalam suatu perusahaan tidak berproduksi (stop), sehingga berdampak kepada tenaga kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja, penurunan kesejahteraan dan overload kerja. Juga akan berdampak kepada persaingan usaha yang tidak sehat dan mungkin saja Industri Semen Nasional akan bernasib sama

dengan Industri baja di Indonesia.

Politisi PKS ini pada pertemuan itu berjanji untuk segera menyampaikan permasalahan ini dalam masa persidangan setelah reses untuk dibahas di Komisi VI DPR RI, dan mengusulkan agenda melakukan audiensi antara FSP-ISI dengan Komisi VI untuk pendalam lebih lanjut dan mempertanyakan terkait perizinan pabrik semen baru ke pemerintah dalam hal ini Kepala BKPM dan Menteri Perindustrian.

"Terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur, Saya mengingatkan Pemerintah, agar ada studi ulang dampak yang akan ditimbulkan. Sejauh apa koordinasi yang telah dilakukan antara BKPM dengan kementerian perindustrian, akan menjadi bahan untuk mengurai semua persoalan industri semen ini", jelas Nevi.

Legislator asal Sumbang II ini mempertanyakan apakah BKPM sudah berkoordinasi dengan kementerian perindustrian terkait dengan



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur, Saya mengingatkan Pemerintah, agar ada studi ulang dampak yang akan ditimbulkan. Sejauh apa koordinasi yang telah dilakukan antara BKPM dengan kementerian perindustrian, akan menjadi bahan untuk mengurai semua persoalan industri semen ini"

perizinan bagi pendirian pabrik semen baru ini di Kalimantan Timur. Sedalam apa kualitas koordinasi ini akan dapat di jelaskan secara gamblang pada rapat kerja atau rapat dengar pendapat di DPR.

"Antar lembaga

dipemerintahkan perlu ada koordinasi agar keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi tercapainya kesejahteraan dan keadilan dan bukan malah menimbulkan permasalahan baru di masyarakat" demikian ujar Nevi Zuairina

Reses, Hermanto Serahkan Bantuan Kambing Kepada Kelompok Tani

KUTIPAN

Jakarta (06/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya

di daerah pemi-lihan singgah di Kabupaten Dharmasraya untuk menyerahkan kambing bantuan Pemerintah.

Kali ini yang beruntung mendapat bantuan kambing tersebut adalah kelompok wanita tani (KWT) Sakinah, Jorong Koto Hilalang II, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya.

"Program ini merupakan salahsatu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Hermanto.

Kambing-kambing ini, menurutnya, bila dirawat sehingga kondisinya baik bisa beranak 3 kali dalam 2 tahun.

"Kalau sekali beranak lahir

2 anak kambing, maka dalam 2 tahun akan mendapat tambahan 6 ekor kambing," papar legislator FPKS DPR ini.

Hermanto minta kelompok kompak dan semangat dalam merawat kambing-kambing tersebut agar kondisinya baik.

"Bila ada permasalahan kesehatan kambing, tanya kepada penyuluh atau mantri hewan yang bertugas disini", pungkask legislator dari Komisi IV DPR ini.

Pada penyerahan tersebut, Hermanto didampingi tokoh muda setempat Suparto.

Sebelumnya, Hermanto juga sudah menyerahkan bantuan kambing kepada 2 kelompok tani lainnya yaitu kelompok tani Kapalo Parak, Kampung Koto Barapak, Nagari Koto Barapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan kelompok tani Tunas Baru, Kampung Baru, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

Ketiga kelompok tersebut masing-masing dapat 25 ekor kambing, jadi total diserahkan 75 ekor kambing.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I



Program ini merupakan salahsatu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kambing-kambing ini bila dirawat sehingga kondisinya baik bisa beranak 3 kali dalam 2 tahun. Kalau sekali beranak lahir 2 anak kambing, maka dalam 2 tahun akan mendapat tambahan 6 ekor kambing.

Peduli Lingkungan, Andi Akmal Bagikan Gerobak Pengangkut Sampah Kepada Dinas LHK Kabupaten Bone

KUTIPAN

Kabupaten Bone (07/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menyalurkan gerobak pengangkut sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Kegiatan ini difasilitasi oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Bantuan yang disalurkan pada kali ini bukan hanya gerobak sampah saja ya. Untuk dinas LHK Kabupaten Bone, kami serahkan Paket lengkap APD, Mesin Pencacah Organik Untuk Rumah Kompos, Mesin Press sampah plastik, Gerobak sampah terpilah dan gerobak sampah tematik", urai Akmal.

Politisi PKS ini dalam menyalurkan aspirasi di daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena permintaan ini merupakan hasil ajuan dari masyarakat yang kemudian di komunikasikan kepada DPR, sehingga melalui DPR dapat mengajukan kepada pemerintah.

"Tapi tentunya kegiatan ini tidak serta merta karena Akmal dalam setiap pekan turun ke lapangan untuk dialog dengan masyarakat di lapangan sehingga dapat mengetahui kebutuhan yang sebenarnya untuk chek dan cross chek," papar Akmal.

Akmal berharap, bahwa kegiatan yang membantu masyarakat menjaga lingkungan tetap bersih dan asri ini dapat dilakukan pada setiap Kabupaten Kota di seluruh Indonesia terutama daerah Sulawesi Selatan.

"Karena ketika program pengendalian lingkungan ini dilakukan, dampaknya memang tidak serta merta langsung

terasa, tapi secara jangka panjang sangat membantu kualitas lingkungan pada skala kecil, bahkan bila masif dapat membantu bumi mempertahankan kualitas kehidupan di atasnya," pungkasnya.

Legislator asal Sulawesi selatan II ini membeberkan, pada tahun 2016, Forum Ekonom Dunia, menemukan fakta di lapangan bahwa, ada 150 juta ton plastik di samudra bumi ini.

"Plastik yang tumpah dari daratan ke laut, setiap tahunnya sebesar 8 juta ton. Indonesia pada tahun 2005, menjadi negara penghasil sampah terbesar di Dunia dengan jumlah produksi sampah sebesar 66-67 ton per tahun," ungkapnya.

Sedangkan pada tahun ini, sebuah lembaga peneliti Internasional merilis Indonesia penyumbang sampah laut terbesar kedua setelah China.

"Publikasi Indonesia sebagai penyumbang sampah laut terbesar ke dua dipaparkan pada jurnal berjudul Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean," sebutnya.

Penghasil sampah laut



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

Bantuan yang disalurkan pada kali ini bukan hanya gerobak sampah saja ya. Untuk dinas LHK Kabupaten Bone, kami serahkan Paket lengkap APD, Mesin Pencacah Organik Untuk Rumah Kompos, Mesin Press sampah plastik, Gerobak sampah terpilah dan gerobak sampah tematik",

terbesar, imbuhnya, secara berurutan China sebesar 262,9 juta ton sampah, Indonesia (187,2 juta ton), Filipina (83,4 juta ton), Vietnam (55,9 juta

ton), dan Sri Lanka (14,6 juta ton).

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungi Dapil saat Reses, Bukhori: Indonesia **Bukan Negara Sekuler!**

KUTIPAN

Kedudukan agama secara filosofis memiliki relasi yang integral dengan wacana kebangsaan sehingga tidak semestinya diposisikan dalam relasi yang saling berhadapan (antagonistik). Hal ini, dibuktikan salah satunya dengan narasi Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang mengandung muatan transendental sebagaimana ditegaskan melalui frasa 'Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...!'

Salatiga (08/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, saat mengunjungi Dapilnya melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Kota Salatiga yang turut dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Salatiga, Muhammad Haris, Minggu (07/03/2021).

Pada kesempatan itu Bukhori menyampaikan pandangan strategisnya ihwal problematika kebangsaan dan keagamaan.

Sebab, Bukhori merasa prihatin dengan kondisi ketegangan antara wacana

keagamaan dan kebangsaan yang terjadi belakangan ini.

Anggota Komisi Agama DPR ini menilai, kedudukan agama secara filosofis memiliki relasi yang integral dengan wacana kebangsaan sehingga tidak semestinya diposisikan dalam relasi yang saling berhadapan (antagonistik).

Hal ini, imbuhnya, dibuktikan salah satunya dengan narasi Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang mengandung muatan transendental sebagaimana ditegaskan melalui frasa 'Atas

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...!'

"Dengan demikian, konstitusi kita secara jujur mengakui kedaulatan Tuhan. Alhasil, jika UUD diibaratkan sebagai akar dari pohon perundang-undangan, maka segala peraturan perundang-undangan berikut pelbagai aturan turunan dibawahnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama, apalagi bertentangan dengan nilai tersebut," jelasnya.

Sehingga, demikian lanjut Bukhori, menjadi sulit bila Indonesia hendak dijadikan negara sekuler, apalagi dipaksa menjadi sekuler. Karena secara filosofis-historis Indonesia bukan negara sekuler.

"Di samping itu, juga menjadi tidak rasional jika politik di Indonesia dipisahkan dari nilai agama. Dan menjadi tidak masuk akal pula apabila agama hanya dijadikan sumber inspirasi, bukan sumber aspirasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Bukhori juga menyorot konsep toleransi dalam Islam. Menurutnya, ruang lingkup toleransi dalam perspektif Islam hanya mencakup pada ranah



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Konstitusi kita secara jujur mengakui kedaulatan Tuhan. Alhasil, jika UUD diibaratkan sebagai akar dari pohon perundang-undangan, maka segala peraturan perundang-undangan berikut pelbagai aturan turunan dibawahnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama, apalagi bertentangan dengan nilai tersebut,"

muamalah semata, bukan pada ranah keyakinan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk mengetengahkan keyakinannya atau menempatkan kedudukan keyakinannya sesuai dengan

hawa nafsu belaka.

"Keimanan itu sudah bersifat final dan tidak bisa ditoleransikan. Namun, pada sikap sosial justru kita tidak boleh menutup diri dalam bertoleransi," tegas Bukhori.



“Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau
tempatkan kami
bersama-sama
orang-orang yang
zalim”

QS. Al A'raf: 47.

Bicara di Forum Internasional

Mufida Sampaikan Kebijakan Anggaran Pandemi Berbasis Gender

KUTIPAN

Jakarta (02/03) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati hadir sebagai peserta aktif dalam forum National Democratic Institute (NDI) yang digelar 1 Maret 2021.

Mufida pun berbicara tentang pengawasan anggaran berbasis gender selama Pandemi Covid-19.

Mufida memaparkan perempuan memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap Covid-19.

"Jumlah penderita covid yang masih dirawat menunjukkan proporsi perempuan lebih banyak (52,2%) dibanding laki-laki (47,8%)," sebut Mufida.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang terpapar covid-19 cenderung menunjukkan gejala sedang dan berat sehingga memerlukan perawatan dan lebih lama sembuh.

"Secara implisit juga menunjukkan daya tahan tubuh yang lebih rendah dibanding laki-laki," imbuhnya.

Perempuan, papar Mufida, meskipun di rumah saja, namun memiliki risiko tertular covid-19 yang tinggi dari suami yang bekerja atau anak remaja yang beraktivitas. Rilis Kementerian PPPA menunjukkan risiko penularan covid-19 pada orang dalam satu rumah 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan melalui kontak dengan orang yang terinfeksi di luar rumah. Bagi wanita bekerja, risiko penularannya menjadi lebih tinggi.

"Ibu Hamil juga menjadi kurang termonitor dengan baik proses kehamilannya karena ada kekhawatiran untuk datang ke RS. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir di masa pandemi ini juga menunjukkan peningkatan

an," papar Mufida dalam forum yang diikuti Anggota Parlemen dari berbagai negara itu.

Mufida mengatakan, dalam konteks penanganan bencana sudah ada Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanganan bencana. Diantaranya mengatur kewajiban untuk memperhatikan pengalaman perempuan pada saat bencana agar intervensi penanganan sesuai dengan kebutuhan.

"Artinya, seharusnya berbagai bentuk dan hal yang dialami dan risiko yang dihadapi oleh perempuan dalam pandemi covid-19 ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan covid-19 termasuk dalam penganggarnya," ujar Mufida.

Anggota DPR RI Dapil Jakarta II ini menyebut, alokasi anggaran Covid-19 di Indonesia cenderung kurang memperhatikan dampak yang dialami perempuan akibat pandemi Covid-19. Apalagi anggaran juga cenderung lebih berat pada pemulihan ekonomi dibanding



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Perempuan memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap Covid-19. Jumlah penderita covid yang masih dirawat menunjukkan proporsi perempuan lebih banyak (52,2%) dibanding laki-laki (47,8%),

penyelamatan kesehatan.

Padahal risiko kesehatan yang dialami perempuan lebih tinggi akibat pandemi.

"Korupsi Bansos memperparah nasib perempuan dalam penanggulangan Covid-19 mengingat perempuan

menjadi kelompok yang sangat terburu dengan adanya program Bansos penanggulangan Covid-19 dengan membantu pemenuhan kebutuhan pokok," ungkap dia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



*Selamat
Milad*

Dr. Hj. **ANIS
BYARWATI**
S.Ag.,M.Si

9 MARET

Semoga senantiasa
diberi kesehatan dan keberkahan
dalam usianya

Terima Aspirasi Lembaga Wakaf,

Fraksi PKS: Wakaf dapat membangkitkan tenaga listrik dan air yang jauh lebih murah

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR RI Komisi VII menerima aspirasi mengenai masukan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan terbarukan (RUU EBT), khususnya terkait wakaf.

Dalam aspirasi tersebut, perwakilan dari Lembaga Waqf Center for Indonesian Development and Studies (WaCIDS) menyampaikan bahwa wakaf adalah partisipasi dari masyarakat untuk sosial. Sehingga, wakaf dapat meringankan beban APBN dengan harga output yang lebih efisien dan terjangkau.

Menanggapi masukan tersebut, anggota Komisi VII Fraksi PKS DPR RI Mulyanto berpendapat bahwa ada dua hal utama yang patut menjadi perhatian dalam pengelolaan wakaf.

"Menurut saya terkait EBT ini tidak ada masalah, yang masalah adalah bagaimana kita menumbuhkan Lembaga wakaf

ini mempunyai bisnis unit yang professional dan akuntabel. Kedua adalah bagaimana kita mendorong muwakif yang mewakafkan hartanya. Kalau dua hal ini sudah kita wujudkan, InsyaAllah melaksanakan ini akan bagus sekali." Tutur Mulyanto dalam hari aspirasi yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (02/03).

Mulyanto berharap wakaf ini bisa menjadi dana abadi khusus untuk penerima manfaatnya. Menurutnya, wakaf yang dikelola oleh Lembaga profesional dapat menghasilkan pengumpulan dana yang lebih besar.

"Tidak ada hambatan, Lembaga wakaf ini akan kita

dorong dan perjuangkan. Jika membesar, ini bisa membangkitkan tenaga listrik dan air yang jauh lebih murah. Jadi, tidak hanya energi untuk pesantren tapi juga masyarakat. Itu potensial jika memang wakaf ini bergerak." Ucapnya.

Mulyanto turut menegaskan bahwa ia tidak menyetujui jika mobilisasi dana wakaf akan dialirkan untuk memperkuat modal negara.

"Kita seharusnya bisa masuk ke Lembaga-lembaga strategis lainnya. Kita justru mengharapkan jika dana yang terkumpul semakin besar, manajemen pengelola makin professional, masuknya pun bukan hanya ke sektor yang menyerap pendanaan tapi juga yang meng-generate pendanaan atau sektor produktif." Tegas Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Mulyanto juga berharap bahwa badan wakaf WaCIDS dapat berperan penting bagi umat bukan hanya dari segi ekonomi namun juga sosial.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Bagaimana caranya agar badan wakaf ini menjadi mainstream, bukan marginal.

Untuk ekonomi umat lalu nanti ke lembaga sosial umat. Saya rasa itu nanti akan jadi keunggulan tersendiri. Karena dana umat, pasti tidak 100 persen profit-oriented karena unsur keniatan yang luar biasa. Dana akan menghasilkan unsur kompetisi karena modalnya adalah modal umat

"Bagaimana caranya agar badan wakaf ini menjadi mainstream, bukan marginal. Untuk ekonomi umat lalu nanti ke lembaga sosial umat. Saya rasa itu nanti akan jadi keunggulan tersendiri. Karena

dana umat, pasti tidak 100 persen profit-oriented karena unsur keniatan yang luar biasa. Dana akan menghasilkan unsur kompetisi karena modalnya adalah modal umat." Tutupnya.

Ketua FPKS DPR Terima Natalius Pigai dan Aktivis Asal Papua **Bicara Kesejahteraan Papua**

KUTIPAN

Jakarta (03/03) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menerima aspirasi yang disampaikan oleh Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bersama sejumlah aktivis dari Papua terkait masalah Otonomi Khusus dan Pemekaran wilayah Papua Selasa, (02/03/2021)

Dalam paparan aspirasinya, Natalius Pigai meminta dukungan Fraksi PKS agar Otonomi Khusus Papua berdasarkan UU 21 Tahun 2001 ditinjau ulang bahkan dibekukan karena tidak menyelesaikan masalah selama 20 tahun implementasinya. Dirinya mengaku juga menyampaikan usulan itu kepada Presiden Jokowi.

“Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No.21 Tahun 2001 yang telah berjalan selama 20 tahun tidak diimplementasikan secara baik, hal ini disebabkan tidak efisien dan tidak efektifnya Otonomi Khusus ini,” ujar Pigai.

Ketua Fraksi PKS

mengapresiasi aspirasi yang disampaikan Pigai dan teman-teman aktivis Papua. Otsus Papua selama ini kerap disebut sebagai solusi pemerintah atas permasalahan di wilayah Papua. Namun, rupanya ada perspektif dan evaluasi lain dari tokoh dan aktivis Papua soal implementasi otsus seperti yang dikemukakan Pigai.

“Kami menangkap pesan dari teman-teman bahwa otsus ini sudah bukan lagi cara yang efektif untuk menjadi solusi, tetapi bagaimana dibuka dialog mengenai apa sesungguhnya yang diinginkan Papua agar lebih maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI,” ucap Jazuli pada

pertemuan yang teragenda di Hari Aspirasi Fraksi PKS tersebut.

Menurut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, aspirasi berdasarkan perspektif orang Papua soal solusi masalah Papua ini sangat berharga bagi PKS, semata-mata agar Papua semakin damai, adil, dan sejahtera dalam wilayah ibu pertiwi.

Jazuli juga menegaskan bahwa Fraksi PKS sudah membentuk dan mengirim anggota Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait Otsus dan pemekaran wilayah ini.

“Kami sudah mengirim anggota Pansus Papua dari Komisi II, Komisi VII, dan Komisi XI. Aspirasi ini akan kita sampaikan langsung kepada anggota-anggota Pansus tersebut,” tegas Jazuli

Sebagai penutup, Jazuli mengapresiasi terobosan yang disampaikan oleh Natalius Pigai dkk yang dinilai bisa menjadi alternatif solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan Papua.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Kami menangkap pesan dari teman-teman bahwa otsus ini sudah bukan lagi cara yang efektif untuk menjadi solusi, tetapi bagaimana dibuka dialog mengenai apa sesungguhnya yang diinginkan Papua agar lebih maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI”

“Tidak cukup otsus, tapi pentingnya dibuka dialog antara tokoh Papua dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, proses pembangunan terus dilakukan tidak dengan pendekatan keamanan (security approach), tetapi dengan

pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Kepercayaan harus terus dibangun antara lain dengan komitmen pemerintah agar tidak terjadi lagi pelanggaran HAM di Tanah Papua,” pungkas Jazuli.

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Rakernas PKS, Habib Aboe: DNA PKS Melayani Rakyat!

KUTIPAN

Jakarta (01/03) — Pembukaan rangkaian Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera digelar di Jakarta, Senin (1/3).

Rakernas nantinya akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, dihadiri 80 persen peserta secara daring, dan 20 persen secara luring dari unsur pimpinan DPTP PKS.

Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan kembali kepada seluruh anggota dan simpatisan PKS bahwa DNA PKS adalah terus bekerja dan melayani rakyat.

"DNA PKS adalah melayani rakyat, ini menjadi komitmen bersama kita hingga akhir hayat, menjadi refleksi kita untuk terus berdiri bersama rakyat," ungkap Habib Aboe.

Masih dalam sambutannya Habib Aboe juga mengungkapkan sikap terkini PKS dalam melindungi dan membela rakyat dengan menolak legalisasi investasi miras, serta penghapusan

santunan bagi korban Covid-19 yang meninggal dunia.

"PKS juga menolak kebijakan penyertaan modal negara terkait skema untuk menanggulung skandal kasus Jiwasraya," tegasnya.

Habib Aboe juga mengingatkan kepada seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PKS agar memahami cara kerja PKS dalam lima tahun kedepan demi memenangkan pemilu pada tahun 2024.

"Melalui Rakernas ini saya berharap seluruh pengurus benar-benar memahami cara kerja PKS dalam lima tahun kedepan, hasil akhir dari kerja-kerja kita hanya bermuara pada dua hal, bertambahnya kader atau anggota dan kemenangan pada pemilu 2024 mendatang," pungkas Habib Aboe.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS



"Melalui Rakernas ini saya berharap seluruh pengurus benar-benar memahami cara kerja PKS dalam lima tahun kedepan, hasil akhir dari kerja-kerja kita hanya bermuara pada dua hal, bertambahnya kader atau anggota dan kemenangan pada pemilu 2024 mendatang,

Capai Target Pemenangan, Presiden PKS Sampaikan **Dua Kunci** Daya Ungkit

KUTIPAN

Jakarta (01/03) --- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengungkapkan

adanya dua kunci utama untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh partai dalam pidatonya di pembukaan Rakernas PKS, Senin (01/03).

"Kunci pertama adalah inovasi. Kita semua harus mengasah pikiran-pikiran kita agar program PKS relevan dengan situasi kekinian yang fresh dan menginspirasi," ungkap Syaikh.

Saat ini Indonesia juga tengah menghadapi bonus demografi yang puncaknya ada pada tahun 2030. Hal ini mengakibatkan generasi milenial dan generasi Z akan mendominasi komposisi penduduk di Indonesia.

"Realitas tersebut harus mendorong kita untuk mendobrak kebuntuan dan kejumudan. Tawarkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan generasi saat ini," pesan Syaikh.

Syaikh mengingatkan agar bonus demografi dapat dijadikan sebagai sebuah keberkahan dan mempersiapkan diri dengan baik.

"Jangan sampai kita abai atau lalai sehingga bonus demografi justru akan menjadi bencana kemanusiaan, sebab jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas," tutur Syaikh.

Menurut Syaikh selain melakukan inovasi kunci utama lainnya adalah multiplikasi.

"PKS harus mampu mencari faktor pengganda agar bisa tumbuh dengan lebih cepat dan masif. Kita harus pandai-pandai mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dengan cara-cara baru," ujar Syaikh.



H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS



Saat ini Indonesia juga tengah menghadapi bonus demografi yang puncaknya ada pada tahun 2030. Hal ini mengakibatkan generasi milenial dan generasi Z akan mendominasi komposisi penduduk di Indonesia. Realitas tersebut harus mendorong kita untuk mendobrak kebuntuan dan kejumudan. Tawarkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan generasi saat ini

Pembukaan Rakernas PKS

Presiden PKS Sampaikan Tiga Koridor Penting untuk Program Nasional dalam Rakernas

KUTIPAN

Jakarta (01/03) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul menyampaikan arahnya agar semua stakeholder serius dalam mengkonsepkan program kerja nasional PKS periode 2021-2025.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tiga koridor penting dalam penyusunan program kerja nasional PKS," ujar Syaikhul dalam pidatonya di pembukaan Rakernas PKS, Senin (01/03).

Syaikhul menuturkan koridor pertama program kerja PKS harus memiliki tiga landasan gagasan.

"Pertama gagasan dari seluruh program kerja PKS harus berakar dari nilai-nilai Islam yang universal dan substansial. Kedua membawa semangat nilai-nilai Pancasila, Kontitusi UUD NRI 1945, NKRI

dan Bhineka Tunggal Ika. Dan Ketiga adalah landasan organisasional yang mengacu kepada aturan partai," jelas Syaikhul.

Koridor kedua, lanjut Syaikhul, adalah landasan pelaksanaan.

"Disini ada beberapa prinsip. Pertama yaitu solutif. Saya meminta agar program kerja yang disusun berorientasi kepada penyelesaian permasalahan serta berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat," papar Syaikhul.

Syaikhul juga mengingatkan prinsip kedua dalam poin landasan pelaksanaan adalah kolaboratif, sebab saat ini sudah memasuki era untuk saling berkolaborasi.

"Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus berkolaborasi dengan baik, harus menjadi pemain tim yang baik. Bukan hanya kolaborasi di internal, tetapi harus membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa," kata Syaikhul.

Syaikhul melanjutkan koridor ketiga adalah landasan kemenangan atau elektoral.

"PKS adalah partai politik, bukan NGO atau ormas. Sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya memiliki dampak terhadap kemenangan politik," ujar Syaikhul.



H. AHMAD SYAIKHUL
Presiden PKS

"Gagasan dari seluruh program kerja PKS harus berakar dari nilai-nilai Islam yang universal dan substansial. Kedua membawa semangat nilai-nilai Pancasila, Kontitusi UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dan Ketiga adalah landasan organisasional yang mengacu kepada aturan partai



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***